

Hasil Penelitian Individu

**FUNGSI DAN WEWENANG BADAN AMIL ZAKAT DALAM
UU NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(Studi pada BAZNAS Kota Palangka Raya)**



**Peneliti:
TRI KIDAYATI, SHI., MH.**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PALANGKA RAYA
JURUSAN SYARIAH
TAHUN 2013**

Hasil Penelitian Individu

**FUNGSI DAN WEWENANG BADAN AMIL ZAKAT DALAM
UU NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(Studi pada BAZNAS Kota Palangka Raya)**



**Peneliti:
TRI HIDAYATI, SHL., MH.**

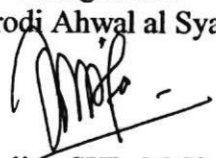
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PALANGKA RAYA
JURUSAN SYARI'AH
TAHUN 2013**

PENGESAHAN PENELITIAN INDIVIDU


1. Judul Penelitian : Fungsi dan Wewenang Badan Amil Zakat dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi pada BAZNAS Kota Palangka Raya)
2. Identitas Peneliti
 - a. Nama : Tri Hidayati, SHI., MH.
 - b. NIP : 198008142002122002
 - c. Jenis Kelamin : Perempuan
 - d. Pangkat/Gol : III/c
3. Bidang Ilmu yang diteliti : Hukum
4. Lokasi Penelitian : Palangka Raya
5. Lama Penelitian : 7 Bulan (Juni-Desember 2013)
6. Tanggal Seminar
 - a. Seminar Proposal : Rabu, 19 Juni 2013
 - b. Seminar Hasil : Rabu, 4 Desember 2013

Palangka Raya, 10 Desember 2013

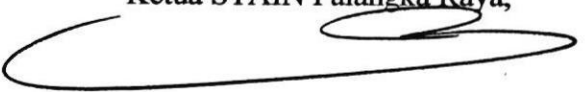
Mengetahui:
Pengelola Prodi Ahwal al Syakhshiyah,


Jelita, SHI., M.Si.
NIP. 198301242009122002

Peneliti,


Tri Hidayati, SHI., MH.
NIP. 198008142002122002

Disahkan oleh:
Ketua STAIN Palangka Raya,


Dr. Ibnu Elmi AS. Pelu, SH., MH.
NIP. 197501091999031002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Hidayati, SHI., MH.

NIP : 19800814 200212 2 002

Dengan mengucap Bismillahirrahmaanirrahim, demi Allah saya menyatakan bahwa Penelitian yang saya ajukan berjudul: "FUNGSI DAN WEWENANG BADAN AMIL ZAKAT DALAM UU NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi pada BAZDA Kota Palangka Raya)" adalah murni hasil pemikiran dan karya saya sendiri, bukan hasil plagiasi atau copy paste.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan seperlunya.

Palangka Raya, 10 Desember 2013

Yang Menyatakan,



Tri Hidayati, SHI., MH.

NIP. 19800814 200212 2 002

KATA PENGANTAR

Alhamduillahirabbil 'alamiin, puji syukur atas limpahan rahmat dan petunjuk Allah SWT. penelitian saya yang berjudul: “FUNGSI DAN WEWENANG BAZNAS DALAM UU NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi pada BAZNAS Kota Palangka Raya)” dapat dirampungkan sebagaimana mestinya.

Penelitian ini merupakan wujud pelaksanaan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya khususnya Program Studi al Ahwal al Syakhshiyah Jurusan Syari'ah STAIN Palangka Raya tahun 2013.

Tak lupa penulis haturkan terima kasih yang tak terhingga atas kesempatan dan bantuan yang telah diberikan demi lancarnya proses penelitian ini, kepada: Ketua STAIN Palangka Raya, Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ketua Jurusan Syari'ah beserta jajarannya, dan Pengurus BAZDA Kota Palangka Raya yang dengan sukarela menyisihkan waktunya untuk memberikan keterangan dan penjelasan atas penelitian ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan bahan bagi para penstudi zakat baik secara normatif-sosiologis dalam rangka pengembangan dan penerapan hukum zakat di Indonesia agar lebih baik ke depannya. Semoga Allah SWT selalu meridhoi dan memberkahi segala amal ibadah kita, amin.

Palangka Raya, 4 Desember 2013

Peneliti,

TRI HIDAYATI, SHI., MH
NIP. 198008142002122002

ABSTRAK

UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 6 menyebutkan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional baik dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat melalui tiga fungsi: perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian. Selain itu, BAZNAS juga berwenang memberikan rekomendasi bagi masyarakat yang hendak mendirikan lembaga amil zakat (Pasal 18 ayat (2) huruf (c)). Ketentuan ini dianggap sebagian kalangan pengelola Lembaga Amil Zakat atau sejenisnya yang sifatnya swadana dan swadaya dari masyarakat untuk masyarakat bahwa BAZNAS merupakan badan yang punya wewenang dominan dan sentralistik dalam seluruh aktivitas yang terkait dengan pengelolaan zakat, dan dinilai akan membatasi gerak langkah LAZ-LAZ yang telah maupun yang sedang memulai aktifitas pengelolaan zakat di masyarakat. UUPZ juga membuka ruang bagi kerjasama antara BAZNAS dan lembaga amil zakat non pemerintah, namun LAZ yang ada sekarang ini harus memenuhi ketentuan Undang Undang dan apapun bentuknya, keberadaan LAZ menurut UU no 23 tahun 2011 harus dalam pengawasan BAZNAS.

Penelitian ini berkonsentrasi pada fungsi dan wewenang Badan Amil Zakat baik secara teoritis filosofis maupun praktis guna mencari solusi dan benang merah terhadap polemik tersebut, dengan mengurai rumusan masalah: 1. Kedudukan dan fungsi BAZNAS yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 2. Wewenang BAZNAS terhadap LAZ dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan 3. Penerapan fungsi dan wewenang BAZNAS Kota Palangka Raya ditinjau dari UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Tujuan penelitian tidak lain untuk mengetahui: 1. Kedudukan dan fungsi BAZNAS yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 2. Wewenang BAZNAS terhadap LAZ dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan 3. Penerapan fungsi dan wewenang BAZNAS Kota Palangka Raya ditinjau dari UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif sekaligus empiris dengan tipe eksplanatoris, dengan menggunakan sumber bahan hukum dan data lapangan secara bersamaan yang selanjutnya dianalisis dengan metode *content analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. BAZNAS memiliki kedudukan yang sangat signifikan dalam pengelolaan zakat nasional (Pasal 6 dan 7 UUPZ) yakni sebagai lembaga negara/pemerintah pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional, yang dilegitimasi melalui Pasal 29 dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. 2. Pemberian wewenang BAZNAS terhadap LAZ atas dasar pengalaman historis (BAZNAS sejajar dengan LAZ) dan filosofis (amanah vertikal (Allah SWT) dan amanah horizontal (masyarakat muzakki dan mustahiq). BAZNAS diberikan wewenang untuk memberi pertimbangan/rekomendasi atas legalisasi lembaga-lembaga zakat yang ada di seluruh Indonesia (Pasal 18 ayat (2) huruf c UUPZ),

karena posisi LAZ dibawah koordinasi dan pengawasan BAZNAS dan berfungsi sebagai penyokong BAZNAS dalam menjalankan fungsinya secara nasional (Pasal 17 UUPZ), dan 3. BAZDA Kota Palangka Raya secara kelembagaan, kepengurusan, dan pelaksanaan program kerja belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat karena beberapa faktor: pengurus memiliki kesibukan dan memiliki jabatan penting, tidak adanya dana operasional dari pemerintah sehingga publikasi sulit dilakukan dan berakibat pada minimnya perolehan jumlah zakat, infak, dan sedekah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Telaah Pustaka/Kajian Terdahulu	9
BAB II. KAJIAN TEORITIS	13
A. Konsep Amil dalam Hukum Islam	13
B. Teori Kelembagaan Pengelola Zakat	22
C. Sejarah Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	32
BAB III. METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Tipe Penelitian	37
C. Sumber Bahan Hukum dan Data	37
D. Objek dan Subjek Penelitian	39
E. Langkah-Langkah Penelitian	39
BAB IV KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAZNAS DALAM UU NOMOR 23 TAHUN 2011	42
A. Sejarah Lahirnya Badan Amil Zakat di Indonesia	42
B. Kedudukan BAZNAS dalam UU Nomor 23 Tahun 2011	51
C. Fungsi BAZNAS dalam UU Nomor 23 Tahun 2011	58

BAB V WEWENANG BAZNAS TERHADAP LAZ	62
A. BAZNAS sebagai Pemegang Wewenang	62
B. Wewenang BAZNAS terhadap LAZ	64
BAB VI PENERAPAN FUNGSI DAN WEWENANG BAZNAS KOTA PALANGKA RAYA	67
A. Profil BAZ Kota Palangka Raya.....	67
B. Pelaksanaan Fungsi BAZNAS Kota Palangka Raya	75
C. Penerapan Wewenang BAZNAS Kota Palangka Raya terhadap LAZ	83
BAB VII PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran: Pedoman Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan pranata keagamaan yang memiliki potensi besar dalam mewujudkan keadilan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Pembahasan masalah korelasi zakat dan kesejahteraan masyarakat sudah sering ditampilkan dan dikaji oleh para pakar, peneliti, maupun praktisi pengelola zakat. Diantaranya M. Ali Hasan mengemukakan bahwa pada dasarnya semua orang menginginkan kehidupan yang layak dan terpenuhi kebutuhan pokoknya, namun kenyataannya tidak semua orang berkesempatan menikmati hal itu karena berbagai faktor diantaranya tidak tersedianya lapangan kerja, kemiskinan, atau rendahnya tingkat pendidikan. Oleh karenanya melalui zakat, Islam memberikan solusi mengatasi kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat dan sekaligus sebagai upaya preventif berupa larangan menimbun kekayaan, berlebih-lebihan (*tasarruf*), dan himbauan untuk berbagi (peduli sesama).¹

Kewajiban membayar zakat bagi orang-orang kaya (*the have*) telah terlegitimasi secara tegas dalam syari'at Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta ijma ulama. Bahkan ditegaskan pula konsekwensi hukum yang

¹ M. Ali Hasan, 2006, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hal 1.

dikenakan bagi para muzaki yang enggan mengeluarkan zakatnya berupa siksaan yang pedih.²

Penekanan akan kewajiban zakat ini berimplikasi pula pada pentingnya sebuah kekuatan dan wewenang dari amir (penguasa/pemerintah) yang memiliki otoritas dalam rangka menjalankan fungsi sebagai penegak syariat penunaian rukun Islam yang ketiga yakni menunaikan zakat bagi yang telah memenuhi kriteria mampu dan mencukupi syarat-syarat wajib zakat. Dalam konteks ini muncul berbagai pandangan tentang konsep amil apakah hanya sebatas sebagai salah satu dari delapan ashnaf atau justru lebih sebagai lembaga atau alat pemerintah dalam menjalankan fungsi kewenangannya.

Salah satu ayat al-Qur'an yang menjadi sumber pembahasan tentang amil adalah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (Q.S. At-Taubah (9): 103)³

Pemaknaan terhadap perintah Allah SWT yang termuat dalam QS. At-Taubah ayat 103 telah melahirkan berbagai konsep dan pemahaman yang beragam di antara para ulama mazhab mengenai kedudukan dan wewenang amil

² Baca QS. At-Taubah (9):34-35 dan QS. Ali-Imran (3): 180.

³ Departemen Agama RI, 2002., Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: CV. Indah Press, hal. 103-104.

dalam menjalankan fungsinya sebagai pengambil, penghitung, pencatat, dan menyalurkannya kepada para mustahiq. Di sisi lain, amilin juga menjadi salah satu dari mustahiq (yang berhak) menerima zakat yang disebutkan dalam Al Qur'an Surah At Taubah ayat 60 yakni orang fakir, miskin, pengurus zakat (*'aamiliin*), para muallaf, budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah (*fi sabilillah*), dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Pemahaman dan pandangan mengenai keharusan zakat dikelola oleh amilin atau individu atau sebagian harta oleh individu dan sebagiannya harus oleh amilin telah muncul pada masa Rasulullah SAW dan periode Khulafaurrasyidin. Pada zaman Rasulullah SAW, zakat merupakan harta yang dianjurkan untuk diambil oleh para shahabat yang diutusnya dari orang kaya dan membagikannya kepada para mustahiq. Pada zaman abu Bakar dan Umar Bin Khattab pun demikian, harta zakat, baik itu yang sifatnya *dzahir* (tanaman, buah-buahan, dan ternak) maupun harta *bathin* (harta emas, perak, perniagaan dan harta galian), semuanya mesti dihimpun dan dibagikan oleh amilin. Baru pada zaman khalifah Utsman, meskipun awalnya mengikuti jejak orang-orang sebelumnya, dikarenakan melimpahnya harta bathin ketimbang harta dzahir disamping banyaknya kaum muslimin yang gelisah dikala diadakan pemeriksaan serta pengawasan terhadap hartanya, keputusan untuk menyerahkan wewenang pelaksanaan zakat dari harta bathin kepada para muzaki pun diberlakukan. Semenjak inilah tumbuh berbagai pemahaman dan pandangan mengenai keharusan zakat dikelola oleh amilin atau individu atau sebagian harta oleh individu dan sebagiannya harus oleh amilin.

Terjadinya permasalahan seperti ini lantaran secara *nash* sendiri tidak ada ayat atau hadits yang secara eksplisit menyatakan harus, tidak boleh atau sunatnya hukum mengadakan amil dalam zakat. Disamping itu, konsep amilin yang berstandar pada syarat kemampuan baik keilmuan tentang zakat, terlebih soal integritas moral berupa kejujuran dan amanah dalam mengemban tugas selaku pengelola zakat, nampaknya masih menjadi polemik yang belum usai di kalangan masyarakat dan pemerintah di Indonesia terutama menyangkut keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang notabene mewakili pemerintah, dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dijalankan oleh masyarakat selama ini.⁴

Terbentuknya Badan Amil Zakat tertuang secara legitimit dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut UUPZ). Pasal 6 UUPZ menyebutkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan untuk skala daerah dilaksanakan oleh BAZNAS baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Sementara itu ditambahkan Pasal 17 yang menyebutkan LAZ dapat dibentuk masyarakat dalam rangka membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

⁴ Judisial Review UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Pasal 5, Pasl 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38, dan Pasal 41) terhadap UUD RI 1945 diajukan oleh Yayasan Dompot Duafa, Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang, Yayasan Yatim Mandiri, dkk ke Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 86/PUU-X/2012.

Kehadiran UU Pengelolaan Zakat tersebut disatu sisi menjadi babak baru dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Zakat telah memasuki ranah publik, setelah sekian lama berkuat pada ranah sosial kemasyarakatan. Untuk mengelola zakat, masyarakat selama ini dapat dengan mudahnya memasang spanduk atau pun pamflet dan bentuk-bentuk pengumuman lainnya, sebagaimana yang sering terlihat di masjid-masjid atau musholla. Dalam beberapa hal, kondisi tersebut bahkan sangat membantu kaum muslim bisa dengan mudah menunaikan zakat tanpa harus melalui birokrasi dan perjalanan yang berbelit. Namun, dari sisi manajemen, pelaksanaan oleh masyarakat umumnya lemah dari sisi administrasi dan kontinuitas program. Karenanya, keberadaan UU Pengelolaan Zakat yang menandai masuknya zakat dalam ranah publik menjadi sebuah babak baru dalam perzakatan Indonesia.

Kehadiran UU Pengelolaan Zakat itu dinilai menyisakan beberapa masalah dari sisi materi yang tercakup didalamnya. Mulai dari kurang mengakomodir kehadiran lembaga amal zakat (LAZ) yang selama ini banyak didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat dengan membatasi LAZ oleh Ormas, ancaman kriminalisasi terhadap unsur masyarakat yang melakukan pengelolaan zakat secara tradisional, dan sejumlah aturan yang dinilai akan membuat pengelolaan zakat di tanah air makin tak efisien.

Undang Undang Pengelolaan Zakat yang memuat 47 pasal tersebut secara jelas telah menegaskan adanya integrasi pengelolaan zakat, dimana seluruh kewenangan dalam hal pengelolaan zakat dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu BAZNAS. Pasal 6 UU Pengelolaan Zakat

tersebut menyebutkan: “BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.” Adapun yang dimaksud dengan pengelolaan pada pasal tersebut, seperti yang ditegaskan pada pasal 1, adalah: “.... kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”. Hal itu dapat dianggap sebagian kalangan pengelola Lembaga Amil Zakat atau sejenisnya yang sifatnya swadana dan swadaya dari masyarakat untuk masyarakat bahwa BAZNAS merupakan badan yang punya wewenang dominan dan sentralistik dalam seluruh aktivitas yang terkait dengan pengelolaan zakat, dan dinilai akan membatasi gerak langkah LAZ-LAZ yang telah maupun yang sedang memulai aktifitas pengelolaan zakat di masyarakat.

Selain 3 fungsi: perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian di atas, BAZNAS juga berwenang memberikan rekomendasi bagi masyarakat yang hendak mendirikan lembaga amil zakat. Pasal 18 ayat (2) huruf (c) menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk memperoleh izin dari Menteri terkait pendirian LAZ adalah memiliki rekomendasi dari BAZNAS. Setiap elemen kelembagaan masyarakat yang hendak terlibat dalam pengelolaan zakat, harus melalui rekomendasi BAZNAS.

Undang Undang Pengelolaan Zakat juga membuka ruang bagi kerjasama antara BAZNAS dan lembaga amil zakat non pemerintah, namun LAZ yang ada sekarang ini harus memenuhi ketentuan Undang Undang dan apapun bentuknya, keberadaan LAZ menurut UU no 23 tahun 2011 harus dalam pengawasan BAZNAS.

Berdasarkan pemikiran di atas, perlu kiranya dilakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap fungsi dan wewenang Badan Amil Zakat baik secara teoritis filosofis maupun praktis guna mencari solusi dan benang merah terhadap polemik tersebut. Secara praktis, penelitian ini akan dilakukan di BAZNAS Kota Palangka Raya sebagai perpanjangan tangan BAZNAS dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, penelitian ini akan dipertajam dengan mengurai satu persatu permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan fungsi BAZNAS yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?
2. Bagaimana wewenang BAZNAS terhadap LAZ dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?
3. Bagaimana penerapan fungsi dan wewenang BAZNAS Kota Palangka Raya ditinjau dari UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan dan fungsi BAZNAS yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

2. Mengetahui wewenang BAZNAS terhadap LAZ non ormas dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
3. Mengetahui penerapan tentang fungsi dan wewenang Badan Amil Zakat Daerah Kota Palangka Raya ditinjau dari UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai kegunaan antara lain:

1. Secara teoritis untuk mengembangkan wawasan keilmuan peneliti mengenai hukum pengelolaan zakat di Indonesia khususnya fungsi dan wewenang BAZ yang tertuang dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; dan memberikan sumbangsih pemikiran berupa kritisasi terhadap kedudukan hukum, fungsi dan wewenang BAZ agar sesuai dengan koridor dan asas keadilan dan kemanfaatan;
2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi pemerintah sebagai pelaksana UU khususnya pemerintah Kota Palangka Raya dan Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya, DPR sebagai legislator, Mahkamah Konstitusi yang saat ini masih menangani yudisial review tentang UU No. 23 Tahun 2011, maupun masyarakat secara keseluruhan termasuk Lembaga Amil Zakat agar memiliki kesamaan visi dan misi mengenai fungsi dan kedudukan BAZ sehingga pengelolaan zakat secara nasional berjalan dengan baik demi kemashlahatan dan kesejahteraan masyarakat.

E. Telaah Pustaka/Kajian Terdahulu

Sepanjang penelusuran dan pengetahuan penulis, penelitian menyangkut UU Nomor 23 Tahun 2011 masih terbilang sedikit mengingat UU ini merupakan regulasi baru. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan kalangan mahasiswa maupun dosen antara lain:

1. Trie Anis Rosyidah dan Asfi Manzilati pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya telah melakukan penelitian tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Beberapa LAZ Di Kota Malang).⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi undang - undang nomor 23 tahun 2011 terhadap legalitas pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat (studi pada beberapa LAZ di Kota Malang) belum tersosialisasi kepada masyarakat sehingga pihak pengelola zakat dan masyarakat ragu bahwa undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat benar-benar diterapkan, hal ini dikarenakan masih banyaknya pasal yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat sehingga menghambat legalitas LAZ dalam mengelola zakat. Maka, diperlukan peninjauan ulang dan sosialisasi mengenai undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang zakat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Wildan Humaidi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 2013 yang berjudul

⁵ <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/188> diakses pada tanggal 23 April 2013

“Pengelolaan Zakat dalam Pasal 18 ayat (2) UU No 23 Tahun 2011 (Studi respon lembaga amil zakat di kota Yogyakarta).⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok amil zakat seperti Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa (amil professional), BAZNAZ Yogyakarta dan LAZIS Muhammadiyah (semi professional), LAZ Masjid Syuhada dan LAZ Masjid Jogokariyan (amil zakat voulenter) memberikan respon yang berbeda. Ada yang menolak dan menerima sebagian dengan alasan masih punya nilai positif untuk penguatan lembaga pengelola zakat namun persyaratan dianggap rumit untuk diimplementasikan (Dompot Dhuafa dan LAZIS Muhammadiyah), dan menerima (BAZNAS Yogyakarta dan LAZ Masjid Syuhada dan LAZ Masjid Jogokariyan).

3. Penelitian tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Masyarakat Terhadap Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah Oleh Aris Khoirul Anam, Jurusan Ekonomi Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap BAZ Kecamatan Karangrayung dibedakan 2 (dua) macam, yaitu berasal dari dalam (faktor intern) dan berasal dari luar (faktor ekstern). Faktor intern yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat yaitu kelembagaan (sistem, manajemen, money, material, metode, market, informasi, aliansi/rencana strategis, kejelasan visi dan misi, program dan rencana kerja, struktur organisasi, legalitas,

⁶ <http://digilib.uin-suka.ac.id/7754/2/BAB%20I%2C%20VI%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>. diakses tanggal 1 Juni 2013

evaluasi kerja dan sosialisasi dan publikasi), Sumber Daya Manusia, (pengurus BAZ Kecamatan Karangrayung), loyalitas dan profesionalisme terhadap BAZ masih rendah, dimana SDM (pengelola zakat) belum professional mengelola zakat masih sambilan, belum optimalnya kepercayaan masyarakat, jumlah muzakki yang harus semakin ditingkatkan, masyarakat belum terbiasa menyalurkan zakat pada BAZ, krisis ekonomi masih dialami oleh masyarakat karena kegiatan ekonomi yang kurang stabil sehingga pendapatan masyarakat menurun, dan masyarakat belum memahami apa yang harus dizakati, serta yang dikenal selama ini barulah sebatas zakat fitrah

4. Penelitian terhadap BAZ Kota Palangka Raya pernah dilakukan oleh Muammar Ma'ruf (Jurusan Syari'ah STAIN Palangka Raya tahun 2009) dengan Judul: "Pengelolaan zakat dan Hubungannya dengan Hak Amil Mendapatkan Gaji di BAZ kota Palangka Raya (Tinjauan terhadap Undang-Undang RI nomor 38 tahun 1999 pasal 23). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk meneliti seberapa besar bantuan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji yang diterima para amil zakat serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan pembagian bantuan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji kepada para amil zakat di BAZ kota Palangka Raya.
5. Siti Fatimah, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Program Studi Magister Administrasi Publik Bidang Konsentrasi: Kebijakan Publik, telah

meneliti tentang: “Peranan Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peranan negara melalui Direktorat Pengembangan Zakat&Wakaf dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan zakat dan mencermati kendala-kendala apa saja dalam negara memainkan peranannya tersebut sehingga akan dicari suatu solusi untuk lebih mengoptimalkan peranan negara dalam pengelolaan zakat. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ada beberapa kendala dalam negara mengoptimalkan perannya tersebut, yaitu kendala internal adalah pengorganisasian yang masih belum profesional sedangkan kendala eksternalnya adalah pemahaman masyarakat yang masih rendah baik tentang zakat maupun UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, dan adanya hambatan politis dalam regulasi pengelolaan zakat oleh negara serta adanya krisis kepercayaan terhadap BAZNAS. Adanya kendala-kendala yang bersifat internal dan eksternal ini mempengaruhi pengoptimalan pengelolaan zakat oleh negara, terutama krisis kepercayaan, dan pemahaman masyarakat tentang paradigma zakat itu sendiri yang masih rendah.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut nampaknya belum ada yang fokus mengkaji norma-norma hukum yang terkait dengan fungsi dan wewenang BAZNAS dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 terkhusus studi pada BAZNAS Kota Palangka Raya. Untuk itu kiranya perlu dilakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Amil Zakat dalam Hukum Islam

1. Dasar Hukum Amil Zakat

Pembahasan tentang Amil Zakat bersumber dari Al-Qur'an Surah At Taubah ayat 60 yang menyebutkan kata '*amilin*' sebagai salah satu yang berhak atas pembayaran zakat sebagaimana tertulis sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷

Selanjutnya pembahasan mengenai tugas 'amil difahami para ulama dari ayat 103 Surah at Taubah sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman

⁷Depag RI, *Op. Cit.*, hal.288

jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁸

Berdasarkan kedua ayat di atas, pembahasan mengenai tentang siapa yang dimaksud dengan amil dan apa saja tugasnya menjadi pemikiran bahkan perbedaan di kalangan para ulama.

2. Pengertian Amil

Kata amil diambil dari potongan ayat 60 Surat At Taubah yang diterjemahkan sebagai pengurus-pengurus zakat. Dalam Kamus Al Munawwar, terdapat kata '*amila (fi'il madhi)*' yang berarti bekerja, bertindak, dan *al 'Aamila (isim fa'il)* berarti yang berbuat/orang yang melakukan.⁹ Amil atau pengelola zakat termasuk salah satu dari delapan *ashnaf* dalam surat at Taubah ayat 60 di atas yang berhak mendapatkan bagian zakat dengan merujuk pada sambungan kata '*alaiha*' setelah kata *al 'aamiliin* tersebut. Menurut M. Quraish Shihab kata '*alaiha*' berasal dari kata '*alaa*' yang mengandung makna penguasaan dan kemantapan atas sesuatu, maka memberi kesan bahwa para pengelola itu melakukan kegiatan mereka dengan sungguh-sungguh dan mengakibatkan kelelahan.¹⁰

Selanjutnya para ulama memberikan definisi yang cukup beragam mengenai amil terkait dengan perintah (*fi'il 'amr*) Allah SWT (خذ) dalam

⁸ *Ibid.* Hal. 297-298

⁹ Ahmad Warson Munawwir, 1997, *Al Munawwar, Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, hal. 973.

¹⁰ M. Quraish Sihab, 2002. *Tafsir al Misbah, Volume 5*, Jakarta: Lentera Hati, hal. 143.

Surah At Taubah ayat 103 di atas baik mengenai definisi maupun sasaran atau yang menjadi subyek dari perintah dimaksud.

Mazhab Hanafi mengartikan amil sebagai orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat. Mazhab Maliki menyebut amil sebagai pengurus zakat, pencatat, pembagi, penasihat, dan sebagainya yang bekerja untuk kepentingan zakat. Mazhab Hambali lebih singkat menyebut amil sebagai pengurus zakat sedangkan mazhab Syafi'i memaknainya sebagai semua orang yang bekerja mengurus zakat dan hanya mendapat upah dari zakat itu.¹¹

Di antara keempat mazhab tersebut memiliki persepsi yang sama bahwa amil adalah pengurus/pengelola zakat baik mengambil, mencatat, membagi bahkan dapat pula menjadi penasehat/konsultan tentang zakat. Akan tetapi hanya mazhab Hanafi yang menyebut bahwa amil adalah orang yang diangkat (diberi kepercayaan) mengelola zakat. Hal ini menunjukkan bahwa amil tidak boleh melakukan kegiatan mengurus zakat manakala tidak ada perintah atau wewenang yang diberikan kepadanya (tanpa dijelaskan siapa yang berhak memberi wewenang tersebut).

Imam Qurthubi menafsirkan ayat tersebut (at Taubah: 60) dengan menyatakan bahwa 'amil adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian

¹¹ Sulaiman Rasjid, 1992, *Fiqh Islam*, Bandung: CV. Sinar Baru, hal. 200-203.

diserahkan kepada yang berhak menerimanya.¹² Pendapat ini menunjukkan bahwa tugas dan wewenang 'amil tersebut dilakukan atas dasar adanya delegasi dari imam/pemerintah.

M. Quraish Shihab menerjemahkan kata *al 'Aamiliin* (bentuk jamak *al 'aamil*) yaitu pengelola-pengelola (zakat), yakni yang mengumpulkan zakat, mencari, dan menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membaginya.¹³ Menurutnya, beberapa ulama memahami perintah ayat ini (at Taubah: 103) sebagai perintah wajib atas penguasa untuk memungut zakat. Tetapi mayoritas ulama memahaminya sebagai perintah sunnah.

Wahbah al Zuhaily menjelaskan bahwa kata *wal 'aamiliina 'alaihaa* menunjukkan bahwa pengambilan zakat dilakukan oleh imam karena jika pemilik harta diperbolehkan mengeluarkan zakatnya sendiri-sendiri, maka tidak diperlukan lagi adanya pengurus atau panitia pemungut zakat. Apalagi dengan adanya perintah sebagaimana ayat 103 surah at Taubah, maka menurutnya imam wajib membentuk dan mengutus panitia pemungut zakat mengingat Nabi SAW dan para khalifah pernah mengutus para pemungut zakat mereka.¹⁴

Shihab juga berpendapat bahwa para pengelola zakat (amil) seharusnya diangkat oleh pemerintah mengingat mereka dinilai sebagai

¹² Al Qurthubi, 1413H/1993 M., *Al Jami' Li Ahkami al Qur'an*, Beirut Lebanon: Daar el Kutub 'ilmiyyah, hal.112-113

¹³ Quraish Shihab, *Op.cit*, hal. 141-143

¹⁴ Wahbah al Zuhayly, 2005., *Zakat, Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal.309

perwakilan penerima zakat dan dapat diminta pertanggungjawabannya secara jelas.¹⁵

3. Keberadaan Amil Zakat dalam Sejarah Islam

Fakta sejarah memperlihatkan bahwa secara umum telah terjadi transformasi atau pergeseran praktek pengelolaan zakat dari kewajiban agama yang ditunaikan kepada penguasa dalam hal ini adalah negara, menjadi kewajiban individu. Perubahan ini menurut Amelia Fauzi (Pakar Filantropi Zakat) didorong oleh tiga hal yakni:¹⁶

- a. Upaya untuk memudahkan perhitungan harta yang dizakatkan akibat begitu melimpahnya harta yang didapat dari penaklukan. Ini dilatarbelakangi oleh ijtihad khalifah Utsman bin Affan, yang diterima oleh sebagian besar para sahabat dan *jurist*, bahwa harta yang dizakatkan dibagi menjadi "yang terlihat" (*amwal al-zahiriyah*) dan "tidak terlihat" (*amwal al-batiniyah*). Hanya amwal al-zahiriyah (yang terlihat), seperti hasil pertanian, yang zakatnya wajib diserahkan kepada negara. Kebijakan ini dimaksudkan, antara lain, untuk membatasi perilaku tidak amanah kolektor zakat.
- b. Adanya kekisruhan situasi politik dan perebutan kursi kekhalifahan yang mendorong umat Islam harus menentukan, kepada "ulil amri" yang mana mereka harus tunaikan zakat. Dan sejak kematian khalifah

¹⁵ *Ibid.*, hal. 233.

¹⁶ Amelia Fauzi, *Sejarah Pengelolaan Zakat*. Lihat <http://www.dsniamanah.or.id/index.php>, online 20 April 2013.

Usman bin Affan, *Kitab al-Amwal* (Buku Kekayaan) menunjukkan bahwa pandangan dan praktek-praktek pemberian zakat kepada individu selain penguasa dimulai.

- c. Adanya sikap kritis para ulama atau ahli hukum atas kebijakan dan perilaku penguasa. Mereka adalah termasuk para imam mazhab besar, seperti Imam Malik, Hambali, Hanafi, dan Syafii. Hal ini mengemuka pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang secara umum menyebutkan bahwa membolehkan pengumpulan zakat oleh penguasa, dengan syarat bahwa penguasa tersebut bersikap adil. Imam Malik membolehkan pengumpulan zakat oleh negara, tetapi menolak adanya pemaksaan negara. Menurut Malik, pembayaran zakat harus diserahkan kepada individu-individu untuk memutuskan apa yang mereka ingin bayar. Imam Syafi'i mendukung pendapat itu dan menambahkan bahwa individu bisa membayar seluruh atau sebagian dari zakat mereka kepada negara. Pendapat ini terutama didasari pada keraguan atas legitimasi penguasa dan ketidakpercayaan terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan. Jadi pada masa itu ada kebolehan menunaikan zakat tidak kepada negara, dan zakat kepada negara hanya dikenakan pada "harta yang terlihat."

Kenyataannya praktek pengumpulan dan pengelolaan zakat dianggap kurang baik, karena adanya penggabungan administrasi keuangan negara dan perpajakan serta pendapatan negara lainnya. *Kitab al-Amwal* dan *Kitab Al-Kharaj* (Buku tentang Pendapatan Negara) menunjukkan

bahwa sistem zakat yang dikelola negara lemah atau kurang berjalan. *Kitab al-Kharaj* ditulis pada masa Abbasiyah mengkritik dan memberikan nasihat kepada Khalifah Harun Al-Rasyid tentang bagaimana mereformasi administrasi pajak dan zakat untuk melindungi rakyat. Pada abad kesepuluh zakat masih merupakan salah satu pemasukan untuk negara, namun sangat tidak signifikan. Pelaksanaan pajak dan juga zakat juga dipenuhi praktek korupsi. Pada masa ini di Dinasti Fatimiyah kolektor zakat hampir tidak ada, demikian hasil pengamatan Imam al-Gazali. Ia juga menceritakan bahwa hanya sejumlah kecil Muslim Sunni membayar zakat, dan mereka tidak membayar kepada negara.¹⁷

Wacana dan praktek zakat pada abad ke 11 dan 12 juga tidak jauh berbeda. Ibnu Khaldun melihat adanya pengumpulan pajak yang cukup masif. Sarakhsi berpendapat bahwa pembayaran zakat adalah kewajiban individu kepada Allah. Selama mundurnya kekuasaan politik penguasa Islam di abad kedua belas hingga abad kelima belas dengan pengecualian Kesultanan Turki Usmani ketika beberapa dinasti Islam dan kerajaan mengalami konflik internal, pengumpulan zakat oleh negara juga menurun. Praktek zakat kemudian bergeser kepada distribusi zakat oleh masyarakat. Mulailah praktek pembayaran zakat dilakukan secara individu oleh umat Islam kepada pemimpin lokal seperti 'ulama, Imam Syiah dan sufi, yang berperan baik sebagai distributor atau amil dan sekaligus penerima manfaat zakat, praktek inilah juga yang ada di Indonesia. Pada abad kedelapan belas

¹⁷ *Ibid*

dan kesembilan belas, karena banyaknya masyarakat Muslim yang hidup di bawah pemerintahan non-Muslim, pengumpulan dan distribusi zakat oleh individu maupun kelompok semakin berkembang dan memunculkan organisasi dan lembaga keIslaman yang mengelola zakat. Karena banyaknya ulama yang melarang pembayaran zakat kepada penguasa yang tidak adil atau penguasa Muslim yang berada di bawah otoritas orang-orang kafir, fenomena lembaga sosial dan kedermawanan juga semakin berkembang.¹⁸

Setelah melewati periode kolonialisme, banyak negara Muslim yang merdeka mengatur zakat sebagai praktik swasta oleh umat Islam tanpa keterlibatan manajemen negara. Saat ini enam negara-negara Islam yakni Arab Saudi, Libya, Yaman, Malaysia, Pakistan, dan Sudan menerapkan pembayaran zakat mal tertentu. Negara-negara ini juga mengatur sanksi terhadap orang-orang yang tidak patuh membayar zakat, tetapi pelaksanaannya tidak dijalankan sungguh-sungguh. Pengelolaan zakat ini juga tidak maksimal, dan malah men-*discourage* perkembangan zakat di masyarakat.¹⁹

4. Syarat dan Tugas Amil

Mengenai syarat bagi pengelola zakat semua ulama sepakat mensyaratkan harus adil dan memiliki keilmuan yang matang tentang seluk

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

beluk zakat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan zakat dan penyalurannya.²⁰

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:²¹

- a. Beragama Islam, syarat ini wajib mengingat zakat merupakan salah satu penunaian rukun Islam bagi kaum muslimin;
- b. *Mukallaf*, yaitu orang dewasa, sehat akal fikiran, dan mampu serta siap menerima tanggung jawab mengurus kepentingan umat dan agama;
- c. Memiliki sifat amanah atau jujur. Amanah artinya berkomitmen menjalankan tugas dan fungsi yang telah diberikan oleh imam dan masyarakat, dan jujur artinya menjunjung tinggi transparansi, tidak menyalahgunakan wewenangnya sebagai amil. Kedua halnya menjadi titik tekan bagi seorang amil karena menyangkut kepercayaan (trust) masyarakat terutama para muzakki. Apabila masyarakat percaya dan yakin akan kinerja amil zakat, maka akan berdampak positif juga bagi peningkatan jumlah muzakki, harta zakat berlimpah dan dapat dinikmati oleh yang berhak (8 ashnaf), maka kesejahteraan hidup masyarakat akan terwujud dengan baik. Hal ini sebagaimana dikemukakan Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Daelami yang artinya

²⁰ M. Ali Hasan, 2000., *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 115.

²¹ Yusuf al Qaradhawi, 1991, *Fiqh Zakat, Juz II*, Beirut: Muassasah Risalah, hal 586

berbunyi; “Amanah itu akan menarik rezeki, sedangkan khianat itu akan menarik kekafiran”²²;

- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat sehingga ia mampu menjalankan tugasnya dengan tepat dan terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dan lebih-lebih diharapkan dapat memberikan pencerahan dan solusi mengenai zakat kepada masyarakat awam sehingga semakin memikat dan menyadarkan para muzakki akan kewajiban zakatnya;
- e. Mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sehat jasmani dan rohani dan fokus (full time) untuk menangani segala hal yang menyangkut tugasnya.

Adapun tugas yang menjadi tanggung jawab pengelola zakat dapat ditarik kesimpulan dari uraian tentang pengertian amil di atas, dimana tugas amil adalah mengelola harta zakat mulai dari menerima, mencatat, menghitung, menentukan mustahiq, dan membagikan zakat kepada para mustahiq baik secara konsumtif maupun produktif.

B. Teori Kelembagaan Pengelola Zakat

1. Teori organisasi

Lembaga atau institusi kadang disebut pula dengan organisasi atau pranata. Istilah lembaga menurut Ensiklopedia Sosiologis diistilahkan dengan institusi, sebagaimana didefinisikan oleh Macmillan bahwa lembaga adalah seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-

²² Didin Hafidhuddin, 2002., *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, hal. 129.

nilai yang nyata, yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang.²³ Definisi ini menunjukkan bahwa lembaga/institusi berorientasi pada kepentingan sosial/umum bukan kepentingan individu. Interaksi antar anggota suatu lembaga membutuhkan prinsip-prinsip organisasi.

Terkadang lembaga disebut juga dengan organisasi meskipun sering terjadi salah kaprah dalam penggunaan kedua kata tersebut, karena menurut Norman T. Uphoff, salah seorang penggagas People-Centered Development Forum membedakan antara organisasi (*organization*) dengan lembaga (*institution*) dengan pernyataan:

*“Organizational structures are structures of recognized and accepted roles. Institutions are complexes of norms and behaviours that persist over time by serving collectively (socially) valued purposes”.*²⁴

Koentjaraningrat menyebut lembaga sebagai pranata yakni suatu sistem tatakelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktifitas tertentu untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.²⁵

²³ Nuridafatimah.bolgsport.com/2012/06/Pengertian-Lembaga-Dan-Organisasi/, online 21 April 2013

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lembaga diistilahkan sama dengan badan (organisasi) yakni sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu.²⁶

Terkait dengan Pengelolaan Zakat, maka yang dimaksud organisasi pengelolaan zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Definisi pengelolaan menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayaagunaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan :

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Menurut Ridwan²⁷, Organisasi pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni :

- a. Sebagai perantara keuangan.

Amil berperan menghubungkan antara pihak Muzakki dengan Mustahiq yang dituntut menerapkan azas *trust* (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulan masing-masing sampai terlihat

²⁶ Depdikbud RI, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, hal 84 dan 655

²⁷ Muhammad Ridwan, 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet 2. Yogyakarta : UI Press, hal. 86

jelas *positioning* organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya.

Tanpa adanya *positioning*, maka kedudukan akan sulit berkembang.

b. Pemberdayaan

Fungsi ini sesungguhnya sebagai upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin; Mustahiq tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi Muzakki baru.

Menurut Latief dalam Filantropi Islam, organisasi umumnya dibagi ke dalam tiga sektor berbeda yaitu:²⁸

- a. Sektor pertama diwakili organisasi bernama negara atau pemerintah (*state agencies*).
- b. Sektor kedua adalah institusi-institusi swasta yang tujuannya tidak lain dari mengakumulasi modal dan melakukan pengembangan unit-unit yang bersifat profit.
- c. Sektor ketiga adalah organisasi sosial atau organisasi non profit.

Ketiga jenis organisasi tersebut memiliki tugas, wewenang dan wilayah yang berbeda namun faktanya ketiganya memiliki *interest* yang sama, misalnya dalam program pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberantasan kebodohan.

²⁸Hilman Latief, 2008. *Filantropi Islam, Agenda Organisasi Sektor Ketiga, dan Masyarakat Sipil Di Indonesia. Zakat dan Empowering. Jurnal Pemikiran dan Gagasan*,. Vol. 1, No. 4, tanggal 9 Agustus 2008, hal. 81.

Pada dasarnya, selama memenuhi syarat dan tepat sasaran, maka berzakat melalui organisasi/lembaga/badan maupun langsung disalurkan sendiri, kedua-duanya memiliki alasan dan dasar hukum yang sah. Namun begitu, sistem kelembagaan dalam pengelolaan zakat tetaplah lebih baik dan lebih utama karena beberapa alasan, antara lain :²⁹

1. Pengelolaan zakat secara kolektif melalui lembaga merupakan alternatif yang lebih dekat dengan sistem ideal pengelolaan zakat dalam Islam. Karena dibawah naungan sistem pemerintahan Islam, zakat dikelola secara kelembagaan formal dari negara dan bersifat kolektif (bukan perorangan).
2. Sistem kelembagaan lebih praktis dan memudahkan, sehingga semangat, komitmen, dan konsistensi dalam menunaikan kewajiban berzakat tetap terus terjaga.
3. Lebih terjamin untuk tepat sasaran dalam pengalokasian dibandingkan dengan jika disalurkan sendiri.
4. Sistem kelembagaan lebih mampu mengelola dan mengalokasikan zakat berdasarkan skala prioritas diantara sasaran-sasaran penyaluran zakat yang banyak jumlahnya dan bermacam-macam golongannya.
5. Sistem kelembagaan menjadikan kewajiban berzakat sebagai syiar yang akan meningkatkan semangat bagi yang telah berzakat sekaligus

²⁹ <http://imamuna.wordpress.com/2011/07/25/fiqih-zakat/>, online 21 April 2013. Lihat pula Didin Hafidhuddin, *Loc. Cit.*

memberikan keteladanan dan dorongan bagi yang belum sadar zakat diantara kaum muslimin.

6. Sistem kelembagaan kolektif lebih efektif untuk menjadikan zakat sebagai basis ekonomi umat karena dana bisa terhimpun dalam jumlah besar dan dialokasikan secara proporsional, hal mana tidak terjadi jika zakat disalurkan secara perorangan.

2. Negara dan Pengelolaan Zakat

Pengertian negara dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam dua makna yakni:³⁰

- a. Organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat;
- b. Negara adalah sekelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, memiliki kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

Dapat disimpulkan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan dan organisasi itu merupakan tatakerja daripada alat-alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, tatakerja yang melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Salah satu alat perlengkapan negara adalah pemerintah.

Secara umum fungsi pemerintahan mencakup tiga fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat

³⁰ Depdikbud RI, *Op. Cit.* hal. 777

maupun pemerintah daerah.³¹

a. Fungsi Pengaturan

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis.

b. Fungsi Pelayanan

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan pertahanan keamanan, agama, hubungan luar negeri, moneter dan peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*Public service*) dan pelayanan sipil (*civil service*) yang menghargai kesetaraan.

c. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan pemerintah daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan.

Pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki atau mengarahkan aktivitas di berbagai sektor. Peran pemerintah berada pada

³¹<http://www.negarahukum.com/hukum/pemisahan-kekuasaan-vs-pembagian-kekuasaan.html>. online pada tanggal 21 April 2013

pemberi legitimasi politik dan sebagai fasilitator untuk kepentingan publik.

Adam Smith mengemukakan teori bahwa pemerintah hanya mempunyai tiga fungsi :

- a. Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan.
- b. Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan.
- c. Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya dengan jalan dan sebagainya.

Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar, yaitu :

- a. Peranan alokasi.

Peranan alokasi yaitu, peranan pemerintah dalam alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien.

- b. Peranan Distribusi

Peranan distribusi yaitu peranan pemerintahan dalam memberikan penyaluran sumber-sumber ekonomi secara tepat sasaran.

- c. Peranan stabilisasi

Peranan stabilisasi yaitu peranan pemerintahan dalam memberikan kebijakan untuk memproteksi sumber-sumber ekonomi.

Francis Fukuyama dalam bukunya *State-Building: Governance and World Order in the 21st Century*, menunjukkan bahwa pengurangan peran negara dalam hal-hal yang memang merupakan fungsinya hanya akan

menimbulkan problematika baru. Bukan hanya memperparah kemiskinan dan kesenjangan sosial, melainkan pula menyulut konflik sosial dan perang sipil yang meminta korban jutaan jiwa.³² Artinya Fukuyama mengatakan bahwa negara harus diperkuat. Kesejahteraan menurut Fukuyama tidak mungkin tercapai tanpa hadirnya negara yang kuat, yang mampu menjalankan perannya secara efektif. Begitu pula sebaliknya, negara yang kuat tidak akan bertahan lama jika tidak mampu menciptakan kesejahteraan warganya.

Pentingnya penguatan negara ini terutama sangat signifikan dalam konteks kebijakan sosial. Negara adalah institusi yang paling absah yang memiliki kewenangan menarik pajak dari rakyat, dan karenanya paling berkewajiban menyediakan pelayanan sosial dasar bagi warganya, walaupun negara bukanlah satu-satunya aktor yang dapat menyelenggarakan pelayanan sosial.

Terkait dengan peran negara dalam pengelolaan zakat, Muhammad Hashim Kamali menyebutkan bahwa:³³

Islam proposes a welfare state as is evident from the overall emphasis in the Qur'an and Sunna on helping the helpless, the needy and the poor. As a pillar of the faith, zakat is prescribed in the Qur'an with the specific purposes of ensuring necessary social assistance. Satisfaction of the basic requirements of those who are in need. Muslims, or other, is one of the main purposes for which state revenues, whether from zakat or other taxes and charities, are to be expanded. The Prophet himself as head of state clearly indicated that the state is committed to this purpose.

³² <http://www.dompetdhuafa.org/2011/04/26/peran-negara-dalam-pengelolaan-zakat-di-indonesia-ii/> online tanggal 21 April 2013

³³ *Ibid.*

Pendapat Francis Fukuyuma (sebagaimana dikutip oleh Edi Suharto) dan juga Muhammad Hashim Kamali, menyiratkan bahwa peran negara dalam kesejahteraan sosial, termasuk dalam pengelolaan zakat memang harus dominan. Hal ini ditunjang pula oleh kenyataan sejarah dari Sirah Nabawiyah dan kepemimpinan para khalifah yang memang mengelola langsung zakat dari masyarakat.³⁴

Ibnu Hajar dan Imam Rafi' sepakat menyatakan bahwa zakat pada masa Nabi SAW. maupun masa-masa setelah Nabi, seperti masa khulafaurrasyidin dan juga pemerintahan-pemerintahan dinasti Islam (bani Umayyah dan Bani Abbas) pada masa pertengahan adalah dikelola oleh Negara. Pendapat ini setidaknya dikuatkan oleh sebuah dokumen berupa surat Imam Zuhri kepada Umar bin Abdul Aziz (salah satu khalifah dari Bani Umayyah), yang berisi penempatan sunnah dalam urusan zakat agar diprioritaskan sebagian untuk orang yang sudah pikun dan orang yang lumpuh, orang miskin yang berpenyakit yang tidak mampu bekerja, si miskin yang meminta-minta dan membutuhkan makanan (sehingga terpenuhi kebutuhannya dan sesudahnya tidak meminta lagi). Sebagiannya juga untuk umat Islam yang ditahan yang tidak mempunyai keluarga seorang pun juga, serta sebagian orang-orang miskin yang datang ke masjid-masjid, yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang teratur, namun tidak mau meminta-minta.³⁵

³⁴ *Ibid*

³⁵ <http://www.uinjkt.ac.id/index.php/section-blog/28-artikel/1410-negara-dan-pengelolaan-zakat.html>. online pada tanggal 21 April 2013

Muhammad Rasyid Ridha menafsirkan bahwa ketika pemerintahannya adalah pemerintahan Islam dan pemimpin-pemimpinnya adalah pemimpin muslim yang amanah maka pengelolaan zakat sepenuhnya berada di tangan negara. Namun ketika pemerintahannya bukan pemerintahan Islam kendati pemimpin-pemimpinnya muslim maka ketentuan tersebut tidak berlaku secara otomatis.

c. Sejarah Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Sejarah eksistensi pranata zakat dalam ruang publik di Indonesia baru dimulai sejak terbentuknya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Namun jauh sebelum itu, pranata zakat telah menjadi bagian kehidupan masyarakat muslim seiring dengan masuknya agama Islam di Indonesia yang bahkan menjadi salah satu sumber dana penyebaran agama Islam terutama untuk bagian *sabilillah* hingga memasuki masa penjajahan dan masa kemerdekaan.³⁶

Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah Kolonial mengeluarkan kebijakan mengenai zakat (4 Agustus 1893) yang dituangkan dalam Bijbald Nomor 1892 dengan tujuan mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh penghulu untuk melaksanakan administrasi kekuasaan pemerintah Belanda. Namun ironisnya para penghulu tersebut tidak digaji dan tidak diberikan jaminan kesejahteraan. Upaya ini dilakukan pemerintah Belanda untuk melumpuhkan sektor pendapatan negara yang bersumber dari zakat

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, hal 6

dengan cara melarang semua pegawai pemerintahan dan priyayi pribumi untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemungutan zakat. Larangan tersebut dituangkan dalam *Bijbald* nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905.³⁷

Pengelolaan zakat pada masa penjajahan dan masa kemerdekaan menunjukkan kenyataan buram dimana antara jumlah umat muslim tidak berbanding lurus dengan jumlah perolehan zakat. Hal ini diantaranya mungkin disebabkan karena tidak terkelolanya zakat secara terorganisir, para muzakki cenderung menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik dan bersifat pribadi atau tertutup, pembayaran zakat masih bersifat konsumtif sehingga kurang berimplikasi jangka panjang terhadap perubahan kesejahteraan masyarakat, dan terlebih disebabkan adanya kekhawatiran terhadap Islam Idiologis (khususnya pada masa orde baru) sehingga memaksa pemerintah untuk tidak terlibat dalam urusan zakat dan terbukti secara struktural tidak ada dukungan yang tegas secara legal formal dari pemerintah.³⁸

Pada masa kemerdekaan dimana pembangunan hukum Indonesia baru mulai dibenahi dan ditata, beberapa tokoh seperti Hazairin pun menentang keras kebijakan peninggalan pemerintah Belanda tersebut dengan argumentasi bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa wajib dengan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Trie Anis Rosyidah dan Asfi Manzilati, tt., *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Beberapa Laz Di Kota Malang)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

kekuasaannya memberikan kebebasan warga negara untuk melaksanakan norma hukum agamanya masing-masing, termasuk umat Islam.³⁹

Pendapat selanjutnya disampaikan mantan Menteri Keuangan Indonesia, Jusuf Wibisono yang pada tahun 1950 pernah menulis gagasannya untuk memasukkan zakat sebagai salah satu komponen perekonomian keuangan Indonesia melalui artikel pada majalah Hikmah. Gagasan inipun mendapat sambutan positif dari kalangan anggota parlemen (DPRS) yang juga menginginkan agar tercipta perundang-undangan tentang zakat.⁴⁰

Mengawali sejarah adanya instrumen hukum positif tentang zakat, pada tahun 1968 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 dan Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kotamadya.⁴¹

Perkembangan selanjutnya seiring dengan dimulainya sistem demokrasi pasca berakhirnya masa kekuasaan Presiden Soeharto pada tahun 1998, babak baru dalam pranata zakat mulai terangkat ke permukaan dan masuk dalam ruang publik secara aktif dimana terlibatnya pemerintah sebagai regulator dan koordinator dalam pengelolaan zakat secara nasional. Tepat pada tanggal 23 Desember 1999 disahkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

³⁹ Hazairin menyatakan bahwa Negara Indonesia sudah memiliki UUD 1945 yang menjadi dasar dan falsafah bernegara, bukan *Regerings Reglement* (RR) tahun 1854 yang kemudian diubah menjadi *Indische Staatsregeling* (IS) tahun 1925 sebagai landasan *Bijbald* nomor 6200 tahun 1905 tersebut. *Ibid.* hal 7.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

dan kemudian disosialisasikan melalui Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 164 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3885.

UU No.38 Tahun 1999 sebagai produk hukum pertama berupa UU ini belakangan dianggap masih perlu revisi dan penambahan disamping sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Gondo Radityo Gambiro (F-PD), salah satu dasar pertimbangan Komisi VIII DPR mengajukan usul perubahan UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan alasan UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan salah satu kemajuan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah ke dalam hukum positif. Namun demikian, lanjutnya, pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999 dirasakan masih belum optimal untuk mengakomodir penyelenggaraan kewajiban zakat dalam sistem yang profesional. Karenanya undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti agar kebijakan pengelolaan zakat dapat dilakukan secara terarah, terpadu, dan terkoordinasi dengan baik serta disesuaikan dengan kebutuhan saat ini.

Ada beberapa hal pokok yang diajukan dalam revisi UU no 38 tahun 1999 yaitu tata kelola zakat, sanksi mangkir zakat, dan persoalan wajib zakat dan pajak karena diperlukan kejelasan tentang peran pengatur, pengawas, dan operator. Sehingga ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Agama RI Prof. DR. H. Said Agil Husin Al Munawar, MA pada tanggal 18 Juli 2003 mencabut Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Menurut Yusuf Wibisono sebagai ahli pemohon dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, amandemen UU No.38 Tahun 1999 sudah dimulai di DPR pada periode 2004-2009. Pada tahun 1999, UU No.38 Tahun 1999 ini sudah masuk di Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 1999 tapi gagal diselesaikan. Sejak awal proses amandemen, ada dua *draft* yang secara umum bertolak belakang, yaitu *draft* RUU dari masyarakat sipil dan *draft* RUU dari pemerintah.

Pada awal Maret 2010, DPR menyelesaikan RUU Pengelolaan Zakat yang isinya cenderung mengakomodir masyarakat sipil. Kemudian RUU diajukan ke pemerintah untuk dimintakan DIM (Daftar Isian Masalah). DIM dari pemerintah baru muncul di awal tahun 2011. Dua *draft* yang bertolak belakang dibahas di DPR pada pertengahan 2011. Masa sidang keempat DPR pada pertengahan 2011 berlangsung singkat, yakni tiga bulan, dan akhirnya amandemen UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat selesai. Akhir tahun 2011 lalu, DPR RI mensahkan UU hasil amandemen yang kemudian diberi nomor 23 tahun 2011 dan disahkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2011 oleh Presiden Republik Indonesia, DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2011 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir Syamsudin.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sekaligus empiris karena penelitian ini tidak hanya dititikberatkan pada pengkajian norma-norma pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang terkait dengan Badan Amil Zakat (BAZ), namun penelitian ini juga dilengkapi dengan data-data empiris tentang penerapan fungsi dan wewenang BAZNAS Kota Palangka Raya.

B. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatoris yang dimaksudkan untuk menerangkan, memperkuat, atau menguji suatu ketentuan hukum tentang fungsi dan wewenang Badan Amil Zakat yang di atur dalam UUPZ dan penerapannya secara empiris pada BAZNAS Kota Palangka Raya.⁴²

C. Sumber Bahan Hukum dan Data

Mengingat penelitian ini merupakan gabungan antara normatif dan empiris, maka untuk melakukan analisis peneliti menggunakan bahan hukum dan data lapangan. Adapun bahan hukum terdiri dari:

⁴² Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hal.9 dan 17

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum utama yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok masalah. Adapun bahan hukum primer penelitian ini adalah:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 115 - Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5255);
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari : Buku, Hasil Penelitian, dan Jurnal Ilmiah Hukum
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari: Kamus Istilah dan Kamus Hukum.

Untuk memperdalam analisis dibutuhkan data yang akan diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan penjelasan berikut:

- a. Observasi dilakukan secara tidak langsung yakni peneliti hanya melakukan pengamatan tanpa terlibat dalam kegiatan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palangka Raya;
- b. Wawancara (*interview*), teknik ini digunakan untuk menggali data dan informasi dengan berkomunikasi secara langsung kepada subjek menggunakan pedoman wawancara (kuesioner) yang bersifat umum;

- c. Dokumentasi untuk mendukung data tentang sarana dan prasarana, dan informasi tertulis yang lain, baik berupa laporan ataupun dokumen-dokumen, sehingga diharapkan dapat menggambarkan secara umum keadaan daerah dan subjek yang diteliti.

E. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah fungsi dan wewenang Badan Amil Zakat dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah Pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya yang ditentukan dengan teknik *Purposive Sampling* atau sample bertujuan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya yang aktif;
- b. Mengetahui tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palangka Raya
- c. Berdomisili di Kota Palangka Raya;

Berdasarkan kriteria tersebut, penulis menentukan hanya 3 (tiga) subyek yang terdiri dari:

- a. Drs. H. Supriyanto (Ketua BAZDA Kota Palangka Raya)
- b. H. Muhdianor Hadi, S.Ag (Sekretaris BAZDA Kota Palangka Raya)
- c. M. Nurdin, S.E (Bendahara BAZDA Kota Palangka Raya)

F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian tesis ini digunakan beberapa langkah mulai dari teknik pengumpulan bahan hukum dan data lapangan hingga dilakukannya

analisis terhadap bahan hukum dan data yang tersedia tersebut. Adapun langkah-langkah dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

Bahan Hukum Primer dikumpulkan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, setelah itu diambil peraturan / ketentuan yang ada hubungannya dengan pokok masalah dalam penelitian ini. Sedangkan Bahan Hukum Sekunder dan Tertier yaitu bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok masalah, dikumpulkan melalui studi pustaka. Untuk memperkaya bahan sekunder maupun tersier maka akan digunakan teknik *snowball* sehingga memungkinkan diperoleh bahan kajian yang lebih mendalam terhadap objek yang diteliti.

Selanjutnya untuk pengumpulan data digunakan beberapa metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

2. Pengolahan dan Analisis Data dan Bahan Hukum

Kegiatan yang dilakukan dalam pengolahan dan analisis bahan hukum primer ini adalah dengan memilih Pasal-Pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang relevan dengan pokok masalah, sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu yang sesuai dengan pokok pembahasan. Bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan atas bahan hukum yang tersedia dan data empiris yang terkumpul akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa

sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang sistematis guna menjawab semua permasalahan yang diteliti.

Pengolahan bahan hukum dan data hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat khusus. Selanjutnya semua bahan yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif berupa *content analysis*. Adapun langkah-langkah menganalisis adalah dengan mengkaji bahan primer, dan ditunjang dengan bahan hukum sekunder dan tertier, serta data lapangan. Hasil analisis terhadap semua bahan hukum dan data-data tersebut kemudian akan diramu kembali untuk akhirnya dapat ditemukan jawaban ilmiah terhadap rumusan masalah di atas.

BAB IV
KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAZNAS
DALAM UU NOMOR 23 TAHUN 2011

A. Sejarah Lahirnya Badan Amil Zakat di Indonesia

Kelembagaan amil zakat di Indonesia secara legitimasi diawali pada masa orde baru. Berbeda dari Masa sebelumnya, yakni masa Penjajahan hingga Masa Kemerdekaan, pengelolaan zakat dianggap sebagai urusan masyarakat baik secara individu maupun kelompok sesuai dengan syariat Islam, tanpa ada keterlibatan pemerintah secara langsung. Perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat mulai terlihat ketika Menteri Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VII/17367 tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Ini menunjukkan bahwa masih terbatasnya keterlibatan pemerintah dalam urusan zakat, dimana zakat fitrah hanyalah sebagian dari kewajiban zakat yang harus ditunaikan umat muslim yang mampu. Surat Edaran itupun dimaksudkan hanya untuk mengatur agar pelaksanaan zakat fitrah dapat berjalan dengan tertib dan mengikuti ketentuan jumlah dan kadar yang disepakati melalui ijtima ulama yang berlaku secara umum. Selebihnya pemerintah belum menunjuk atau membentuk lembaga khusus yang menangani pengelolaan zakat tersebut, dan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak sesuai syariat Islam.

Tiga belas tahun berikutnya Pemerintah melalui Kementerian Agama semakin menaruh perhatian dengan menyusun Rancangan Undang-Undang

tentang Pelaksanaan Zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Maal. Akan tetapi hingga memasuki Masa Orde Baru kedua peragkat peraturan tersebut tidak sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun kepada Presiden.¹

Pada masa Orde Baru, Menteri Agama Republik Indonesia menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang zakat dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan Surat Nomor: MA/095/1967. RUU tersebut juga disampaikan kepada Menteri Sosial selaku penanggung jawab masalah-masalah sosial dan Menteri Keuangan selaku pihak yang berwenang dalam bidang pemungutan. Lantas Menteri Keuangan dalam jawabannya menyarankan agar masalah zakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agama.²

Atas saran dan petunjuk Menteri Keuangan, dikeluarkanlah dua Peraturan sekaligus terkait pengelolaan zakat yakni Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Maal. Antara Badan Amil Zakat dan Baitul Maal dianggap mempunyai keterkaitan yang sangat erat dimana Baitul Maal

¹ Depag RI, 2008. Panduan Organisasi Pengelola Zakat, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat Depag RI, hal.6-7

²*Ibid*, hal.7

berfungsi sebagai penerima dan Penampung Zakat, yang kemudian disetor Badan Amil Zakat untuk disalurkan kepada yang berhak.³

Secara teknis pada masa ini Badan Amil Zakat berada dalam kewenangan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji. Untuk mendukung optimalisasi pengelolaan zakat, dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infaq Seribu Rupiah selama Bulan Ramadhan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19/1984 tanggal 30 April 1984. Selanjutnya Pembinaan dilakukan atas dasar Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Menindaklanjuti KBM tersebut pada tahun 1998, Menteri Agama secara mandiri mengeluarkan Instruksi Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.⁴

Berlanjut hingga masa reformasi, eksistensi kelembagaan Amil Zakat di Indonesia mulai diperjelas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Langkah ini ditempuh sebagai upaya untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat di Indonesia agar dapat menggali potensi zakat guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi bangsa yang terpuruk akibat krisis ekonomi global dan krisis multidimensi yang melanda Indonesia. Dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 ini terdapat dua organisasi pengelola zakat yakni:

³ *Ibid.*, hal. 7-8

⁴ *Ibid.*, hal. 8

1. Badan Amil Zakat (BAZ) yang merupakan bentukan Pemerintah yang terdiri dari Pemerintah dan unsur masyarakat dengan jenjang kewilayahannya mulai tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan. Secara hirarki organisasi BAZNAS terdiri dari:
 - a. BAZNAS untuk tingkat Pusat;
 - b. BAZDA Provinsi
 - c. BAZDA Kabupaten/Kota
 - d. BAZDA Kecamatan
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas Islam, yayasan dan institusi lainnya yang telah memenuhi syarat dan mendapat pengukuhan dari Kementerian Agama.

Menindaklanjuti UU Nomor 38 Tahun 1999, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.⁵

Sebelumnya BAZNAS secara kelembagaan mengalami tarik ulur kepentingan legitimasi. Dilatarbelakangi oleh keinginan yang sangat kuat dari para pengurus BAZIS (Badan Amil Zakat ,Infaq dan Sadaqah) di seluruh provinsi yang ingin menyatukan visi dan misi dalam membangun umat melalui pengelolaan zakat yang amanah dan profesional, maka melalui *Mudzakarah*

⁵ *Ibid.* hal.9

pengurus BAZIS se-Indonesia, utusan ulama se-Indonesia, dan utusan Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) pada bulan Maret 1992 di Jakarta menyepakati agar ada BAZIS Nasional yang berada di ibukota Jakarta, yang kemudian diamini oleh Menteri Agama (KH. Munawir Syadzali) dan Menteri Dalam Negeri (H. Rudini). Seiring dengan itu, bermunculanlah beberapa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai instansi negeri dan swasta, BUMN/BUMN sebagai wujud antusiasme umat Islam, dan ditambah menjamurnya lembaga pengelola zakat seperti Dompot Dhuafa, LAZIS NU dan LAZIS Muhammadiyah,⁶ meskipun ternyata rekomendasi *mudzakarah* tersebut ditolak oleh presiden (Soeharto). Akhirnya dibentuklah asosiasi Forum Zakat (FOZ) yang terdiri atas BAZ (pemerintah) dan LAZ (swasta) seluruh Indonesia. Dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001, tanggal 17 Januari 2001 BAZNAS resmi terbentuk.⁷

Bermunculannya beberapa LAZ yang secara legal dapat mengelola zakat mulai dari mengumpulkan hingga mendistribusikan kepada orang-orang yang berhak ternyata dianggap belum mampu meningkatkan *ghairah* berzakat bagi para muzakki.(pembayar zakat). Disisi lain, keberadaan Badan Amil Zakat dan sosialisasi bahkan implemantasi UU Nomor 38 Tahun 1999 ini masih terbatas yang dibuktikan dengan masih minimnya jumlah dan prosentasi para muzaki yang berzakat melalui lembaga zakat. Banyaknya Organisasi Pengelola Zakat yang lahir namun belum cukup mendorong pengentasan kemiskinan

⁶ Sejak berlakunya UU Nomor 38 Tahun 1999, ada 14 LAZ tingkat Pusat yang telah dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama, baik yang berkedudukan di Jakarta, Bandung, Surabaya, maupun LAZ tingkat Provinsi seperti LAZ Daarut Tauhid di Bandung. *Ibid.*, hal. 10

⁷ Kemenag RI, 2012. *Profil LPZ*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, hal. 29-30.

seperti yang tertuang dalam tujuan pembentukan UU Nomor 38 Tahun 1999. Tidak adanya pengendalian yang jelas justru menimbulkan kekhawatiran adanya penyimpangan dan penyalahgunaan dana zakat tersebut.

Atas berbagai pengalaman dan pertimbangan tersebut di atas, maka disepakati oleh berbagai pihak terutama FoZ (Forum Zakat) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) agar UU Nomor 38 Tahun 1999 segera diamandemen dengan mengusung konsep bahwa mendorong BAZNAS sebagai regulator teknis dan pengawas bagi seluruh lembaga amil zakat di Indonesia dengan alasan bahwa BAZNAS merupakan satu-satunya lembaga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) dan karenanya BAZNAS dapat dan harus bersikap independen.⁸

Dalam rentang waktu yang cukup lama yakni selama periode DPR tahun 2004-2009 dan dilanjutkan periode 2009-2014 yang berlangsung selama 2 (dua) tahun upaya amandemen dengan penyusunan RUU pengelolaan zakat yang baru berhasil disahkan oleh DPR meskipun sebelumnya mengalami beberapa kali perubahan konsep dan tarik menarik kepentingan yang sangat kuat sehingga menjadi UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada tanggal 27 Oktober 2011 yang memuat 11 bab dan 47 pasal. Terdapat 4 (empat) poin besar yang menonjol dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 ini meliputi:

⁸ Alasan lain yang mendasari amandemen UU Nomor 38 Tahun 1999 yakni Ide pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak dan penerapan sanksi atas muzakki yang ingkar membayar zakat. Baca Kemenag RI, 2012. *Petunjuk Teknis Evaluasi dan Pelaporan LPZ*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, hal.14.

1. Pengelolaan zakat menjadi kewenangan negara melalui BAZNAS, dan masyarakat diperkenankan secara mandiri mengelola atas izin dari pemerintah melalui pertimbangan BAZNAS;
2. Pengelolaan zakat secara nasional dilakukan oleh BAZNAS yang memiliki hirarki dari pusat, propinsi hingga kabupaten/kota (BAZDA dirubah menjadi BAZNAS). Sementara BAZ Kecamatan dirubah menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan BAZNAS dapat membentuk UPZ lainnya;
3. Anggota BAZNAS terdiri dari delapan orang perwakilan masyarakat dan tiga orang perwakilan pemerintah. Perwakilan masyarakat terdiri dari ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat, sedangkan perwakilan pemerintah dari unsur kementerian terkait;
4. LAZ berperan membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat dan wajib melaporkan kegiatan pengelolaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2011 inilah BAZNAS baik pusat hingga daerah memiliki fungsi dan wewenang yang sangat strategis dan cenderung kompleks, tidak hanya sebagai pengelola zakat namun merangkap sebagai regulator dan pengawas bagi pengelolaan zakat secara nasional baik yang dilakukan oleh BAZNAS sendiri dan terhadap LAZ-LAZ yang ada di masyarakat.

Adapun BAZNAS secara organisasi kini memiliki hirarki sebagai berikut:

1. BAZNAS Pusat

Berkedudukan di Jakarta dengan keanggotaan berjumlah 11 orang terdiri dari unsur masyarakat sebanyak 8 orang (ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam) dan unsur pemerintah yang ditunjuk dari Kementerian/Instansi yang berkaitan dengan Pengelolaan Zakat. Masa kerja anggota BAZNAS berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan (Pasal 8 dan 9).

Pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS menjadi otoritas Presiden atas usul Menteri Agama RI dan khusus anggota BAZNAS yang berasal dari unsur masyarakat diangkat atas dasar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu (Pasal 10).

BAZNAS bertugas mengelola zakat secara nasional, namun UU Nomor 23 Tahun 2011 tidak menyebutkan komposisi jabatan dan rincian tugasnya. Hal ini dimaksudkan agar memberikan ruang gerak keleluasaan dan kemandirian pada para anggota BAZNAS untuk menyusun dan menjalankan tugas kepengurusannya.⁹

2. BAZNAS Propinsi

BAZNAS Propinsi merupakan pelaksana pengelolaan zakat yang berorientasi kewilayahan dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada BAZNAS Pusat dan Pemerintah Daerah secara berkala.¹⁰

Pengurus BAZNAS Provinsi dibentuk oleh menteri atas usul Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari BAZNAS Pusat. Ini

⁹ Kemenag, *..Profil LPZ....op.cit.* hal. 11

¹⁰ *Ibid.*, hal. 12

dimaksudkan untuk mematangkan usulan yang akan diajukan kepada Menteri.

Komposisi dan rincian tugas kepengurusan BAZNAS pun tidak dijelaskan secara gamblang dalam Pasal 15 dan 16 UU Nomor 23 Tahun 2011. Untuk mengantisipasi dapat merujuk pada BAB XI Pasal 44 yang menyatakan bahwa semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011.

3. BAZNAS Kabupaten/Kota

BAZNAS Kabupaten/Kota berada setingkat di bawah BAZNAS Provinsi dan karenanya berkewajiban menyampaikan laporan kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah kab/kota setempat.

Pembentukan BAZNAS Provinsi maupun kabupaten/kota oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Gubernur atau bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Jika ternyata bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Gubernur atau Bupati/Walikota tidak memiliki wewenang penuh sebagaimana yang pernah diatur dalam UU Nomor 38 Tahun 2011.

Selanjutnya menurut Pasal 16 UU Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS Pusat, Propinsi dan kabupaten/kota dapat membentuk beberapa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

B. Kedudukan BAZNAS dalam UU Nomor 23 Tahun 2011

Kedudukan BAZNAS dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dapat diamati melalui Pasal 6 berikut:

“BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional”

Dijelaskan pula dalam Ketentuan Umum UU Nomor 23 Tahun 2011 bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dalam hal ini Menteri Agama Republik Indonesia dan juga kepada DPR RI paling sedikit 1 kali dalam setahun. Ini menunjukkan bahwa BAZNAS memiliki kedudukan yang sangat strategis dan dominan dalam menentukan berhasil tidaknya pencapaian tujuan pengelolaan zakat yakni meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹¹

¹¹ Lihat penjelasan Umum UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat alenia kesatu dan keempat

BAZNAS bersifat mandiri dimaksudkan untuk memberi keleluasaan dalam menyusun kepengurusan, dan membuat serta menjalankan program pengelolaan zakat sehingga mampu menjadi lembaga yang profesional. Dalam hal menyusun kepengurusan, UU Nomor 23 Tahun 2011 nampaknya hanya menjelaskan jumlah personil keanggotaan, namun tidak menjelaskan struktur kepengurusan, komposisi dewan pertimbangan dan komisi pengawasan sebagaimana pernah diatur dalam UU No. 38 Tahun 1999. Kebijakan baru ini lebih diberikan kepada BAZNAS sesuai dengan kebutuhannya¹² dan UU ini memberikan batasan syarat bagi calon anggota BAZNAS yang termuat dalam Pasal 11 dan memuat hal-hal yang menyebabkan diberhentikannya anggota BAZNAS dalam Pasal 12.

Adapun BAZNAS bersifat nonstruktural artinya tidak termasuk dalam struktur organisasi Kementerian Agama RI., khususnya Direktorat Jenderal Bimas Islam yang sebelumnya terlibat langsung dalam Kepengurusan BAZNAS ataupun BAZDA (dalam UU Nomor 38 Tahun 1999) yang dapat mengakibatkan disfungsi BAZNAS.

Ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2011 ini jelas berbeda jika dibandingkan dengan kedudukan BAZNAS dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 yang menempatkan BAZNAS pada posisi sejajar dengan Lembaga Amil Zakat lainnya dalam fungsinya yakni mengumpulkan, mendistribusikan dan

¹² Kemenag RI, *Profil LPZ....Op.Cit.* hal. 7.

memberdayakan zakat. Akibatnya masing-masing organisasi pengelola zakat ini mengalami *lost* koordinasi dan pengawasan.

BAZNAS sebagai lembaga negara/pemerintah yang independen menunjukkan juga bahwa adanya peran negara baik secara langsung melalui regulasi maupun tidak langsung melalui BAZNAS sebagai operator dan teknisi. Keterlibatan negara dalam mengatur hubungan masyarakat apalagi dengan tujuan kesejahteraan dan kemajuan bangsa tentu tidak bisa diabaikan begitu saja. Keberadaan hukum-hukum yang telah tercipta dan tersusun tidaklah cukup untuk mengatur masyarakat, namun dibutuhkan adanya kekuatan eksekutif untuk memastikan hukum tersebut dapat diimplementasikan secara baik di masyarakat.¹³

Sejalan dengan pendapat ini, Francis Fukuyuma (sebagaimana dikutip oleh Edi Suharto) dan juga Muhammad Hashim Kamali, menyiratkan bahwa peran negara dalam kesejahteraan sosial, termasuk dalam pengelolaan zakat memang harus dominan. Hal ini ditunjang pula oleh kenyataan sejarah dari Sirah Nabawiyah dan kepemimpinan para khalifah yang memang mengelola langsung zakat dari masyarakat.¹⁴

Dalam banyak teori dan sejarah sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II di atas, menunjukkan berperannya pemerintah dalam menangani berbagai persoalan bangsa dan negara, baik melalui fungsi pengaturan, fungsi

¹³ Gazi Inayah, *Op. Cit.* hal 132

¹⁴ *Ibid*

pelayanan, dan fungsi pemberdayaan. Terkait masalah zakat ketiga fungsi ini mesti ada dan saling berhubungan satu sama lain. Apalagi mengingat pranata zakat sangat potensial dalam membantu mensejahterakan masyarakat, melalui distribusi dan pendaayagunaannya baik secara konsumtif apalagi produktif, Hasilnya bahkan tidak hanya untuk umat muslim *unsich*, karena konsep Islam adalah *rahmatan lil'aalamin* begitupun segala syariat di dalamnya adalah dalam rangka kemashlahatan seluruh alam.

Disamping itu, legitimasi keterlibatan negara dalam persoalan pengelolaan zakat ini juga merujuk kepada Konstitusi Negara Indonesia khususnya Pasal 29 dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Konsep Negara berketuhanan yang Maha Esa (Pasal 29 ayat (1)) mewajibkan negara melalui perangkatnya untuk menjamin kemerdekaan setiap penduduk dalam memeluk dan menjalankan ibadah menurut agama masing-masing (Pasal 29 ayat (2)). Pranata zakat yang merupakan sendi Ibadah bagi Umat Islam khususnya di Indonesia telah diakui dan difasilitasi secara hukum dalam rangka menunaikan titah Pasal 29 UUD 1945.

Adapun Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi: “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” jelas sejalan dengan konsep zakat yang memang mengusung rasa kemanusiaan dan kasih sayang dengan cara mendermakan harta dari yang berlebihan (*the have*) kepada yang membutuhkan (*the hope*) tidak hanya fakir, miskin, dan anak-anak terlantar, bahkan amil (pengelola zakat), ibnu sabil (orang yang kehabisan bekal dalam

perjalanan), sabilillah (orang yang berjuang di jalan dan atas nama Allah SWT), gharim (orang yang terlilit hutang), Muallaf (orang baru masuk Islam), dan riqab (orang yang memerdekakan budak), sebagaimana biasa disebut delapan asnaf dalam Al-Qur'an Surat At Taubah ayat 60.¹⁵

Adanya campur tangan negara dalam pengelolaan zakat ini menurut Nuruddin ada beberapa alasan:¹⁶

1. Zakat hukumnya wajib (imperatif) sementara *charity* atau donasi hukumnya mandub (sunnah). Pemungutan zakat dapat dipaksakan berdasarkan firman Allah dalam surat al-Taubah (9) ayat 103. Satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas untuk melakukan pemaksaan seperti itu dalam sistem demokrasi adalah negara lewat perangkat pemerintahan, seperti halnya pengumpulan pajak maka zakat akan menjadi salah satu sumber penerimaan negara.
2. Potensi zakat yang dapat dikumpulkan dari masyarakat sangat besar.
3. Zakat mempunyai potensi untuk turut membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional jika disalurkan secara terprogram dalam rencana pembangunan nasional. Dalam periode tertentu, suatu negara membuat rencana pembangunan di berbagai bidang sekaligus perencanaan

¹⁵ Para mustahik lainnya dalam kondisi khusus yang dianggap berhak mendapatkan zakat adalah anak jalanan, gelandangan, pengemis, anak-anak putus sekolah, korban bencana alam, remaja dan pemuda pengangguran, korban kekerasan, dan Pekerja Seks Komersial (PSK). Baca Depag RI, 2009. *Panduan Pengembangan Usaha bagi Mustahiq*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, hal. 11-12.

¹⁶ Nuruddin Mhd.Ali dalam <http://abumujahidah.blogspot.com/2012/11/zakat-dan-relevansi-pengelolaannya-oleh.html> diakses tanggal 23 Juli 2013

anggarannya. Potensi zakat yang cukup besar dan sasaran distribusi zakat yang jelas seharusnya dapat sejalan dengan rencana pembangunan nasional tersebut.

4. Sebagai pengintergrasi, sehingga dana zakat dapat disalurkan secara tepat, efisien dan efektif yang pada akhirnya mencapai tujuan zakat itu sendiri seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat.
5. Memberikan kontrol kepada pengelola negara, sebab masuknya dana zakat ke dalam perbendaharaan negara diharapkan akan menyadarkan mereka bahwa di antara uang yang dikorupsi itu terdapat dana zakat yang tidak sepatasnya dikorupsi juga.

Senada dengan pendapat di atas, Hidayatullah pun menguraikan beberapa alasan pentingnya intervensi negara atau pemerintah dalam pengelolaan zakat, antara lain:¹⁷

1. Zakat membawa kekuatan imperatif (kewajiban) pemungutannya dapat dipaksakan. Negara yang mempunyai otoritas untuk melakukan pemaksaan seperti halnya pajak, karena negara mempunyai kekuatan dengan perangkat pemerintahannya, dan didukung regulasi yang mengikat dana zakat akan mudah terkumpulkan, kemudian dapat menjadi bagian pendapatan negara seperti halnya pajak;

¹⁷ <http://www.uinjkt.ac.id/index.php/section-blog/28-artikel/1410-negara-dan-pengelolaan-zakat.html> diakses pada tanggal 23 Juli 2013.

2. Besarnya jumlah potensi harta zakat yang belum tergali secara maksimal mengharuskan menjadi perhatian negara;
3. Alternatif pengentasan kemiskinan karena penggunaan dana APBN dan/atau APBD dirasakan belum cukup mengatasi tingginya angka kemiskinan di negara ini;
4. Zakat untuk keadilan yang menjadi bagian prinsip dasar kenegaraan. Persoalan keadilan dan kesejahteraan umum adalah persoalan struktural yang tidak mungkin terjangkau secara merata tanpa melibatkan negara;
5. Pengelolaan zakat oleh negara, dapat membangun jaringan kerja lebih terarah, semakin mudah berkoordinasi, komunikasi dan informasi dengan unit pengumpul zakat (LAZ), sehingga pengentasan kemiskinan semakin terarah, tepat guna dan tidak tumpang tindih dalam penyaluran dana zakat, kepastian dan mendisipilinkan *muzakki* (wajib zakat) membayar zakat ke lembaga semakin terjamin, sekaligus terbangun konsistensi lembaga pengelola zakat bisa terjaga terus menerus karena sudah ada sistem yang mengatur;
6. Pengelolaan zakat yang dilakukan negara dapat bersinergi dengan semangat otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Peran konkrit Pemerintah Daerah dalam mekanisme pengelolaan zakat dengan memfasilitasi pembentukan Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) di daerah, menetapkan susunan organisasi LPZ sesuai masing-masing daerah, menempatkan aparatur Pemda sebagai pengurus BAZ, membantu biaya operasional LPZ daerah setiap tahun. Dana zakat yang

terkumpul dari daerah didistribusikan kembali kepada daerahnya masing-masing.

Dengan demikian dapat difahami bahwa BAZNAS dalam kedudukannya sebagai lembaga negara mempunyai tugas yang besar dalam mengemban misi mensejahterakan masyarakat dalam bingkai ibadah yang mengusung konsep keadilan dan saling menghargai.

C. Fungsi BAZNAS dalam UU Nomor 23 Tahun 2011

Dalam melaksanakan tugas selaku penyelenggara zakat secara nasional, BAZNAS memiliki tanggung jawab menjalankan tiga fungsi terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan dalam hal pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Pasal 6 dan Pasal 7 UUPZ).

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS hingga saat ini masih belum disahkan oleh Pemerintah sehingga belum dapat dikemukakan apakah ada perbedaan dengan peraturan sebelum UUPZ 2011 ini berlaku. Mengacu pada peraturan sebelumnya, yang dituangkan dalam buku petunjuk teknis pengelolaan zakat oleh Institut Manajemen Zakat (2001) bahwa Badan Amil Zakat terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana dengan uraian fungsi sebagai berikut:¹⁸

1. Dewan Pertimbangan menjalankan fungsi: memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi

¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dan Perekonomian Umat....Op. Cit.*, hal. 131-132

Pengawas dalam Pengelolaan Badan Amil Zakat meliputi aspek syari'ah dan manajerial

2. Komisi Pengawas berfungsi sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilakukan Badan Pelaksana
3. Badan Pelaksana berfungsi sebagai pelaksana pengelolaan zakat dengan tugas berikut:
 - a. Membuat rencana kerja;
 - b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - c. Menyusun laporan tahunan;
 - d. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah;
 - e. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam dan ke luar.

Agar ketiga fungsi tersebut dapat berjalan sesuai prosedur dan aturan yang diamanahkan dalam UUPZ, ada beberapa hal yang digariskan oleh Kementerian Agama RI agar dijadikan acuan setidaknya mengantisipasi sebelum terbitnya Peraturan Pelaksana dari UUPZ, yakni:¹⁹

1. Perencanaan yang matang

Perencanaan harus dilakukan setidaknya 3 bulan sebelum masuknya masa pelaksanaan program, dengan memilah antara perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat dan segala sesuatu yang terkait dengan ketiga kegiatan dimaksud yang terdiri dari

¹⁹ Kemenag RI, Profil LPZ..., Op.Cit., hal 19-26.

rencana program kerja dan anggaran biaya yang dibutuhkan yang masih bersifat umum.

2. Pengorganisasian terstruktur

Maksudnya perencanaan yang sudah dibuat harus terorganisir secara matang dengan devisi dan atau bagian-bagian yang ada dalam BAZNAS tersebut, tidak asal-asalan atau mendadak sehingga tidak terlaksana secara maksimal. Antisipasi atas hal-hal yang memungkinkan terjadinya perubahan rencana juga patut diperhitungkan lebih awal.

3. Pelaksanaan tanggung jawab

BAZNAS selaku organisasi sosial, keagamaan dan kemsyarakatan memikul tanggung jawab besar baik vertikal maupun horizontal. Untuk itu dalam melaksanakan fungsi ini, dibutuhkan tiga hal berikut:

- a. Kreatifitas pengumpulan, misalnya dengan gencar mensosialisasikan kewajiban dan hikmah zakat, membuat dan mengaktifkan beberapa UPZ di komunitas muslim muzakki, membuat event-event yang melibatkan para aghniya dan sebagainya.
- b. Distribusi yang terencana, baik untuk konsumtif maupun produktif berdasarkan syariat Islam dan harus ada skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (Pasal 25 dan Pasal 26 UUPZ).
- c. Pendayagunaan yang terprogram dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan ekonomi para mustahik

4. Pengawasan rutin dan evaluasi

Pengawasan dan pembinaan terhadap BAZNAS secara kelembagaan menjadi wewenang Menteri pada level nasional, gubernur pada level propinsi, dan bupati/walikota untuk level kabupaten/kota. Dibutuhkan pula tim khusus yang bertugas mengaudit sistem pengelolaan zakat baik administrasi maupun akuntansinya. Disamping itu, Pasal 35 UUPZ menyebutkan bahwa masyarakat juga berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS.

BAB V

WEWENANG BAZNAS TERHADAP LAZ

A. BAZNAS sebagai Pemegang Wewenang

Salah satu gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Kata “terintegrasi” menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat ini, baik dilakukan BAZNAS di semua tingkatan maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat legalitas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Integrasi dalam pengertian undang-undang dimaknai Didin Hafudhuddin lebih relevan daripada “sentralisasi” terkait ketentuan Pasal 6 UUPZ di atas. Melalui integrasi pengelolaan zakat, dipastikan potensi dan realisasi pengumpulan zakat dari seluruh daerah serta manfaat zakat untuk pengentasan kemiskinan akan lebih terukur berdasarkan data dan terpantau dari sisi kinerja lembaga pengelolanya. Secara keseluruhan pasal-pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang sedang disiapkan, memberi ruang dan jaminan bagi terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah, profesional, transparan, akuntabel dan partisipatif.²⁰

²⁰ M. Fuad Nasar, M.Sc (Wakil Sekretaris BAZNAS), *Integrasi Pengelolaan Zakat Pasca UU No. 23 Tahun 2011*, dalam <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011>

Integrasi pengelolaan zakat menempatkan BAZNAS sebagai koordinator atas dasar wewenang yang diberikan sesuai Pasal 6 UUPZ tersebut. Pengkoordinasian yang dilakukan BAZNAS inilah yang ke depan akan mengawal jalannya proses integrasi dan sinergi dari sisi manajemen maupun dari sisi kesesuaian syariah. Ketika LAZ menjadi bagian dari sistem yang dikoordinasikan BAZNAS, maka posisinya secara hukum menjadi kuat, sehingga prinsip dan tuntunan syariah dalam Al Quran (QS At Taubah 9 : 103 dan 60) dapat terpenuhi.²¹

Penempatan BAZNAS sebagai pemegang wewenang tidak terlepas dari pengalaman historis, dan makna filosofis yang melatarbelakanginya. Berkaca pada UU Nomor 38 Tahun 1999 sebelumnya yang menempatkan BAZNAS pada posisi sejajar dengan Lembaga Amil Zakat lainnya dalam fungsinya yakni mengumpulkan, mendistribusikan dan memberdayakan zakat. Akibatnya masing-masing organisasi pengelola zakat ini mengalami *lost* koordinasi dan pengawasan, sehingga pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan yang diinginkan dalam UU tersebut menjadi sumir, atau mungkin tidak merata dan sulit untuk dikalkulasikan. Akibatnya tujuan untuk peningkatan taraf dan taraf hidup masyarakat sulit tercapai dengan baik.

Secara filosofis, BAZNAS menjadi alat bagi negara/pemerintah yang bersifat independen menunjukkan pentingnya kekuatan eksekutif untuk menjalankan perintah UUPZ baik secara langsung melalui regulasi maupun

²¹ *Ibid*

tidak langsung melalui BAZNAS sebagai operator dan teknisi. Keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat ini menjadi penting tidak hanya dalam perspektif yuridis berlandas pada sunnah rasul dan praktek khalifah rasyidin, terlebih pentingnya dibentuk sistem zakat yang terorganisir, professional, dan akuntabel sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang diemban para amil.

B. Wewenang BAZNAS terhadap LAZ

Dalam kapasitasnya sebagai koordinator dan integrator, BAZNAS bertugas memonitor, mengawasi dan membina bahkan memberikan pertimbangan/rekomendasi atas legalisasi lembaga-lembaga zakat yang ada di seluruh Indonesia (Pasal 18 ayat (2) huruf c).

Salah satu wewenang yang diberikan UU kepada BAZNAS selain sebagai operator zakat yakni mempertegas sistem administratif legalisasi bagi lembaga atau amil yang sedang atau yang akan melakukan kegiatan pengelolaan zakat. Karena menurut ketentuan Pasal 17 UUPZ, posisi LAZ dibawah koordinasi dan pengawasan BAZNAS dan berfungsi sebagai penyokong BAZNAS dalam menjalankan fungsinya secara nasional .

Lembaga Amil Zakat selaku pihak yang membantu BAZNAS bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat disyaratkan harus dibentuk atas izin pejabat yang berwenang yakni Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk menteri (Pasal 18 ayat (1) UUPZ). Adapun beberapa syarat yang mesti dipenuhi terlebih dahulu untuk mendapatkan izin tersebut sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18 ayat (2) UUPZ adalah:

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
2. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
3. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
4. Memiliki pengawas syariat;
5. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
6. Bersifat nirlaba;
7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
8. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Berdasarkan persyaratan di atas, BAZNAS berwenang memberikan atau tidak memberikan rekomendasi bagi Lembaga Amil Zakat yang akan mengurus izin sebagai LAZ resmi. Hal ini menunjukkan bahwa apabila LAZ tersebut tidak mengantongi rekomendasi dari BAZNAS maka LAZ bersangkutan secara administratif tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin operasional sebagai LAZ yang apabila dilanggar maka diancam Pidana sesuai Pasal 38 Juncto Pasal 41 UUPZ dengan dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Semua persyaratan di atas wajib dipenuhi oleh para amil dengan maksud antara lain: memudahkan pengawasan dengan kewajiban para LAZ untuk menyampaikan laporan secara rutin kepada BAZNAS sebagai

koordinator. Hanya saja perlu diperjelas arah model integrasi dengan pola koordinasi tersebut berikut pula penegasan batasannya. Dalam kaitan ini, menurut Didin Hafidhuddin (Ketua BAZNAS) dan M. Fuad Nasar (Wakil Sekretaris BAZNAS), fungsi koordinasi dan integrasi pengelolaan zakat perlu dilihat dari empat perspektif, yaitu:²²

1. Untuk mengefektifkan fungsi koordinasi dan sinergi BAZNAS dan LAZ dalam rangka akselerasi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dalam skala nasional;
2. Untuk memberikan legalitas kepada BAZNAS dalam upaya membangun sistem dan jaringan informasi pengelolaan zakat. BAZDA dan LAZ ke depan berkewajiban dan bahkan dapat dikenakan sanksi administratif apabila terjadi penyimpangan;
3. Untuk mendorong pemerataan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS. Pada prinsipnya hanya BAZNAS yang memiliki kewenangan untuk menghimpun zakat dari lingkungan Kementerian/Lembaga, BUMN, Perwakilan RI di Luar Negeri, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), BUMD, lingkungan mesjid, kecamatan, desa, dan lain-lain melalui pembentukan UPZ.
4. Untuk menjalankan fokus pengumpulan serta sasaran pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

²² <http://harian-pelita.pelitaonline.com/cetak/2013/09/19/megefektifkan-koordinasi-baznas#.Um3QmX37NoN> diakses tanggal 28 Oktober 2013

-fungsi-

BAB VI

PENERAPAN FUNGSI DAN WEWENANG

BAZNAS KOTA PALANGKA RAYA

A. Profil Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya

1. Sejarah Pembentukan Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya

Seiring dengan berlakunya UU Nomor 38 Tahun 1999 Pengelolaan Zakat, Departemen Agama RI (sekarang Kementerian Agama RI) membentuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Palangka Raya pada tahun 2000 sebagai pengganti Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) yang masih merupakan bagian tata organisasi pemerintah di Departemen Agama Kota Palangka Raya.

Pembentukan BAZDA Kota Palangka Raya tersebut melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Organisasi Keagamaan seperti Nahdhatul Ulama (NU) dan Pengurus Daerah Mumammadiyah Kota Palangka Raya beserta beberapa tokoh masyarakat dan pemerintah daerah Kota Palangka Raya. Kepengurusan BAZDA Kota Palangka Raya pun terbentuk dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Walikota Palangka Raya Nomor: 460/1004/2000 untuk masa bakti 2000-2003 dengan personalia pengurus yang masih sangat terbatas sebagai berikut:²³

Ketua	: H. Ahmas Majdi Indi (Almarhum)
Wakil Ketua	: Drs. H.M. Anshari Sapri
Sekretaris	: Drs. H. Muslimin (Kepala Seksi Urusan Agama

²³ Muammar, hal. 44

Islam)

Wakil Sekretaris : Drs. H. Masdani

Setelah berakhir periode kepengurusan, Kepala Kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya setelah mendapat masukan dari unsur MUI, Tokoh Organisasi NU dan Muhammadiyah maupun tokoh masyarakat lainnya di tingkat Kota Palangka Raya mengusulkan komposisi dan personalia kepengurusan BAZDA Kota Palangka Raya untuk masa bhakti 2003-2006. Usulan tersebut kemudian disahkan oleh Walikota Palangka Raya dengan SK Nomor 155 Tahun 2003 tanggal 14 Oktober 2003 dengan susunan sebagai berikut:²⁴

Ketua Badan Pertimbangan : H. M. Syaili Mochtar

Ketua Badan Pengawas : H. Abu Sadikin

Ketua : Drs. H. Anshari Sapri

Wakil Ketua : Drs. H. Supriyanto

Sekretaris : Drs. H. Masdani

Wakil Sekretaris : Drs. Supiani

Setelah berakhir masa kepengurusan 2003-2007, kembali dibentuk kepengurusan baru untuk masa periode 2007-2010 dengan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 80 Tahun 2007 tanggal 18 Maret 2007 tentang Penetapan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya dengan komposisi dan personalia yang lebih lengkap

²⁴ Laporan Sekilas tentang BAZ Kota Palangka Raya: 2007, tt

sesuai ketentuan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yakni sebagai berikut:²⁵

1. **Penanggung Jawab:** Walikota Palangka Raya
2. **Dewan Pertimbangan**
 - Ketua : Drs. H. Masrani Arsyad (Kakandepag Kota Palangka Raya)
 - Sekretaris : Drs. H. Masdani (Kasi Peny. Haji & Umrah Depag Kota Palangka Raya)
 - Wakil Sekretaris: Drs. H. Zainur Rahmi (Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya)
 - Anggota : 1. KH. Syarkawi, AA (Ketua MUI Kota Palangka Raya)
2. Drs. KH. Anwar Isa, Lc (Tokoh Agama)
3. H. Abu Sadikin (Tokoh Masyarakat)
3. **Komisi Pengawas**
 - Ketua : Drs. H. Djambran Kurniawan (Waket DPRD Kota Palangka Raya)
 - Wakil Ketua : Junaidi, S.Ag (Anggota DPRD Kota Palangka Raya)
 - Sekretaris : H. Zulis Sujiono, SE (Kasubbag TU Depag Kota Palangka Raya)
 - Wakil Sekretaris : Drs. H. Mahlani Ahmad (Masyarakat)
 - Anggota : 1. H.M. Muksin (masyarakat)
2. Drs. H. Syahdin Hasan (masyarakat)
3. Drs.H.M. Anshari Sapri (Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Tengah)
4. **Badan Pelaksana**
 - Ketua : H.M. Saily Mochtar, SE.,MT (Wakil Walikota Palangka Raya)
 - Wakil Ketua : Dra. Hj. Jamilah Ya'kub (Asisten I Sekda Kota Palangka Raya)
 - Wakil Ketua II : Drs.H. Burhanuddi, MM. (Ka. Dinas Perindagkop Kota Palangka Raya)
 - Sekretaris : Drs. Misbah, M.Pd (Kasi Mapenda Islam Depag Kota Palangka Raya)
 - Sekretaris I : H. Ibnu Suub Buhan (Peny. Zakat & Wakaf Depag Kota Palangka Raya)
 - Sekretaris II : Hj. Windarti, S.Ag (Staf Panamas Depag Kota Palangka Raya)

²⁵ Pengurus BAZ Kota Palangka Raya, 2007. *Laporan Kegiatan BAZ Kota Palangka Raya*, t.p., t.h.

Bendahara : Palangka Raya)
: Ismail Marzuki, SE (Staf Peny. Zakat & Wakaf
Depag Kota Palangka Raya)

5. Seksi-Seksi

1. Seksi Pengumpulan

Kepala : Drs. H. Muhammad (Kasi Urais Depag Kota
Palangka Raya)
Sekretaris : Nurjannah, S.Ag (Kasi Pekapontren Depag Kota
Palangka Raya)
Anggota : 1. Mohdiannoor Hadi, S.Ag (Kasi Urais Depag
Kota Palangka Raya)
2. Drs. Masduqi (Kepsek MIN Kalampangan)
3. Drs. H. Ardiansyah (Pengawas Agama Islam
Depag Kota Palangka Raya)
4. H. Syafi'I Aslam (Ulama/masyarakat)

2. Seksi Pendistribusian

Kepala : Drs. Adri Nasution (Kasi Panamas Depag Kota
Palangka Raya)
Sekretaris : H. Noerbek (Pengawas Agama Islam Depag Kota
Palangka Raya)
Anggota : 1. H. Katma F. Dirun (Kesra Setda Kota Palangka
Raya)
2. H.R.Bardansyah, SE (Dinas Sosial Kota
Palangka Raya)
3. H. Maksum, S.Fil.I (Staf Panamas Depag Kota
Palangka Raya)
4. Ahmad Basyir (Staf Urais Depag Kota Palangka
Raya)

Berdasarkan personalia kepengurusan BAZ Kota Palangka Raya periode 2007-2010 di atas nampak masih didominasi oleh para pegawai di lingkungan Departemen Agama Kota Palangka Raya dan dari beberapa instansi terkait yang nota bene memiliki tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang penting dan strategis di instansi masing-masing pada saat itu.

Berlanjut hingga akhir periode, kepengurusan BAZ Kota Palangka Raya untuk periode 2011-2014 pun dibentuk dengan personalia dan komposisi kepengurusan yang akan dijelaskan selanjutnya.

2. Pengurus dan Pengelola

Kepengurusan yang saat ini masih berjalan telah dikukuhkan pada tanggal 24 Mei 2011 setelah sebelumnya diusulkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya kepada Walikota Palangka Raya dengan Surat Nomor Kd. 15.06/7/BA.032/1747/2011 tanggal 19 Mei 2011. Menindaklanjuti itu, Walikota Palangka Raya menyetujui dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 178 Tahun 2011 tentang Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Palangka Raya Masa Bhakti Tahun 2011-2014.²⁶

Salah satu dasar hukum yang dirujuk dalam Keputusan Walikota Palangka Raya adalah UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk itu, prosedur pembentukan, penentuan komposisi dan personalia masih mengacu pada UU Nomor 38 Tahun 1999 dan berikut peraturan pelaksanaannya. Adapun struktur kepengurusan dimaksud adalah sebagai berikut:²⁷

A. DEWAN PERTIMBANGAN

1. Ketua : H. M. Riban Satia (Walikota Palangka Raya)
2. Wakil Ketua : Drs. H. Baihaqi, M.AP. (Kepala Kantor
Kementerian Agama Kota Palangka Raya)
3. Sekretaris : Drs. H. Mahlani

²⁶ Sesuai Pasal 6 ayat (2) huruf c UU Nomor 38 Tahun 1999 bahwa pembentukan Badan Amil Zakat daerah kabupaten atau kota oleh bupati atau walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau kota.

²⁷ Lampiran Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 178 Tahun 2011.

4. Wa Sek : Ahmad Sabur Karim, S.Pd
5. Anggota : 1. KH. Zainal Arifin (Ketua MUI Kota Palangka Raya)
2. Drs. H. Zaini Majidi (Tokoh Agama)
3. M. Zuhri, S.HI (Tokoh Masyarakat)

B. KOMISI PENGAWAS

1. Ketua : Drs. H. Zainur Rakhmani
2. Wakil Ketua : Drs.H. Misbah, M.Ag (PNS Kemenag Kota Palangka Raya)
3. Sekretaris : Hj. Nurdjannah, S.Ag (PNS Kemenag Kota Palangka Raya)
4. WaSekretaris: Drs. Hj. Susilowati
5. Anggota : 1. Drs. H. Anwar Isa, Lc (MUI)
2. H. Ramli A. Ghani, M.Hi (Tokoh masyarakat)
3. H.Aswadi HAS (Tokoh Masyarakat)

C. BADAN PELAKSANA

1. Ketua : Drs. H. Supriyanto (Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya)
2. Wakil Ketua : H. Sugiarno, Aks (Kabag Kesra Pemerintah Kota Palangka Raya)
3. Sekretaris : H. Muhdianor Hadi, S.Ag (Kasi Penyelenggaran Syari'ah Kemenag Kota Palangka Raya)
4. WaSekretaris: Sugianto, ST (Anggota DPRD Kota Palangka Raya)
5. Bendahara : M. Nurdin, S.E (Staf Mapenda Kemenag Kota Palangka Raya)

D. SEKSI-SEKSI

1. Seksi Pengumpulan

- a. Ketua : Drs. H. Tuani (sekarang KaKemenag Kab. Barito Utara)
- b. Sekretaris : Rus'ansyah, S.Ag (sekarang Kepala MTs An Nuur Palangka Raya)
- c. Anggota : 1. H. RD. Bardansyah, SE.
2. H.M. Al Ghifari (Da'i)
3. Rahmat Fauzi, S.Sos.I (Staf Kemenag Propinsi Kalimantan Tengah)

2. Seksi Penyaluran

1. Ketua : Drs. H. Muhammad

2. Sekretaris: Hj. Windarti, S. Ag (PNS Kemenag Kota Palangka Raya)
 3. Anggota : 1. Iin Purwantini, S.E (PNS Kemenag Kota Palangka Raya)
 2. Hj. Nanik Mulyati, A.Ma (staf Seksi Penyelenggaraan Syari'ah Kemenag Kota Palangka Raya)
 3. Ismail Marzuki, SE (PNS Kemenag Kota Palangka Raya)
3. Seksi Pendayagunaan
1. Ketua : Drs. H. Masdani (PNS Kemenag Kota Palangka Raya)
 2. Sekretaris: M. Anshar, S. Sos.I (PNS Kemenag Kota Palangka Raya)
 3. Anggota : 1. M. Ali Muttaqo, S.E (PNS Kemenag Kota Palangka Raya)
 2. M. Anshori, S.Sos.I (PNS Kemenag Kota Palangka Raya)
 3. Aan Nurhanita, SE (PNS Kemenag Kota Palangka Raya)

Apabila diperhatikan, nama BAZDA dan struktur kepengurusan di atas menunjukkan bahwa BAZDA Kota Palangka Raya masih merujuk pada UU Nomor 38 Tahun 1999 dimana sebagian besar pengurus merupakan aparatur pemerintah ditambah dari beberapa unsur Tokoh Agama dan Masyarakat. Hal ini mengacu pada Pasal 6 ayat (5) yang menyatakan bahwa: “pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu”, dan strukturnya terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana (Pasal 6 ayat (6)).

Kepengurusan masih berlaku hingga sekarang dan belum dilakukan perubahan, sebab meskipun UU Nomor 23 Tahun 2011 telah berlaku namun mengingat belum adanya peraturan pelaksanaanya, maka

mengacu pada Ketentuan Peralihan Pasal 43 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2011 yang berbunyi:²⁸

Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini

Untuk membantu administrasi pelaksanaan program, BAZDA Kota Palangka Raya mengangkat 1 (satu) orang tenaga administratif/staf yang bernama Norainah (24 tahun) pada tahun 2012. Pengangkatan staf ini menurut Muhdiannur Hadi (Sekretaris BAZDA Kota Palangka Raya) disebabkan kesibukan para pengurus BAZDA Kota Palangka Raya yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada instansi/lembaga ataupun pekerjaan masing-masing.²⁹

3. Sekretariat

Hingga saat ini BAZDA Kota Palangka Raya belum memiliki kantor sendiri sejak awal terbentuknya. Kantor sekretariatnya masih bertempat di Kantor Kemenag Kota Palangka Raya jalan AIS Nasution Nomor 6, tepatnya di ruang seksi Penyelenggara Syari'ah Kemenag Kota Palangka Raya dengan nomor telpon 0536 3385319. Disamping itu, dalam rangka sosialisasi secara online BAZDA Kota Palangka Raya telah

²⁸ Wawancara dengan Drs. H. Supriyanto (Ketua BAZDA Kota Palangka Raya) pada tanggal 4 September 2013

²⁹ Wawancara di ruang sekretariat BAZDA Kota Palangka Raya pada tanggal 30 Juli 2013

membuat blog dengan alamat *bazkotapalangkaraya.blogspot.com*, namun sejak tahun 2012 hingga sekarang belum bisa diaktifkan karena belum adanya petugas yang mampu dan mempunyai waktu untuk mengelolanya.³⁰

B. Pelaksanaan Fungsi BAZNAS Kota Palangka Raya

BAZDA (BAZNAS) Kota Palangka Raya sebagai lembaga yang dibentuk atas perintah UU memiliki tugas dan fungsi tersendiri dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan zakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2011 yakni meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan kesadaran manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu dibutuhkan strategi dan manajemen yang terencana, dan terarah agar hasil yang diharapkan dapat maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun hukum.

Apabila mengacu pada ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2011, terdapat empat fungsi yang harus dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat baik tingkat nasional maupun daerah. Keempat fungsi dimaksud adalah fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan dalam pelaksanaan pengelolaan zakat (pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat).³¹

³⁰ *Ibid*

³¹ Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan hasil penelusuran melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dapat diuraikan pelaksanaan keempat fungsi BAZNAS di BAZDA Kota Palangka Raya sebagai berikut:

1. Fungsi Perencanaan

BAZDA Kota Palangka Raya periode 2011-2014 memiliki program kerja jangka panjang (2011-2014) dan program kerja tahunan yang mengacu pada konsep 8 asnaf mustahiq. Hal ini dinyatakan oleh Ketua dan Sekretaris BAZDA Kota Palangka Raya³², namun diakui bahwa secara administratif program kerja tersebut tidak terinventaris secara baik dan lengkap dalam file khusus. Secara lisan disampaikan bahwa program kerja BAZDA Kota Palangka Raya secara umum adalah melaksanakan Program Perencanaan, Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah secara professional, transparan, dan amanah. Program Kerja tersebut dirangkai dalam beberapa tujuan yang ingin dicapai setiap tahunnya sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Organisasi BAZ yang professional, transparan, dan amanah;
- b. Meningkatkan kesadaran umat Islam di Kota Palangka Raya dalam berzakat, berinfaq dan bersedekah;
- c. Meningkatkan nilai besaran pengumpul ZIS baik dari lingkungan SKPD Pemkot, sekolah-sekolah, perusahaan, UPZ mesjid/mushalla dan warga masyarakat muslim perorang;
- d. Terwujudnya pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah secara professional, tepat guna dan tepat sasaran;

³² Wawancara kepada Sekretaris dan Bendahara BAZDA Kota Palangka Raya dilakukan pada tanggal 30 Juni 2013 pukul 09.15-11.47 WIB di ruang Sekretarian BAZDA Kota Palangka Raya dan wawancara dengan Ketua BAZDA Kota Palangka Raya dilakukan pada tanggal 4 September 2013 di ruang kerja Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya

- e. Pembangunan sumber daya manusia penerima/mustahik yang memiliki daya kompetitif dan turut serta mencerdaskan sumber daya yang terdidik.³³

2. Fungsi Pelaksanaan

Fungsi pelaksanaan pengelolaan zakat meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam hal pengumpulan, objek yang dikelola BAZDA Kota Palangka Raya tidak hanya zakat namun meliputi pula infak dan shadaqah. Ada beberapa tahapan yang dilakukan Pengurus BAZDA Kota Palangka Raya dalam melakukan pengumpulan zakat, infak, dan shadaqah yakni sebagai berikut:

a. Publikasi

BAZDA Kota Palangka Raya sangat minim dalam hal publikasi dengan alasan tidak tersedianya dana operasional dari pemerintah kota Palangka Raya. Menurut sekretaris BAZDA Kota Palangka Raya, selama periode 2011-2014 belum pernah memperoleh dana operasional. Pengajuan proposal pernah diajukan pada tahun 2011 dan 2012 namun terkendala komunikasi dan koordinasi sehingga budget belum tersedia untuk BAZDA Kota Palangka Raya. Ketiadaan dana operasional inipun disebabkan minimnya perolehan dana zakat sehingga hak amil terpaksa ditiadakan.

Publikasi hanya dilakukan pada saat menjelang dan masa bulan Ramadhan dengan hanya berupa spanduk yang disebar di dua tempat

³³ Laporan kegiatan BAZDA Kota Palangka Raya Tahun 2012 dan 2013

yakni di pasar besar dan di pasar wadai Ramadhan. Sementara blogspot yang telah dibuat pada awal tahun 2011 oleh mantan karyawan BAZDA Kota Palangka Raya hanya aktif hingga tahun 2012 dan saat ini tidak aktif disebabkan tidak adanya pengurus ataupun pengelola BAZDA Kota Palangka Raya yang memiliki keterampilan internet dan tentunya waktu yang tidak memungkinkan bagi para pengurus yang juga memiliki pekerjaan utama di tempat kerjanya masing-masing.

b. Pembentukan dan Pengaktifan UPZ

Untuk membantu pelaksanaan program, BAZDA Kota Palangka Raya telah membantuk UPZ yang hingga saat ini berjumlah 112 dengan rincian: 65 UPZ pada Sekolah Agama, 25 UPZ di dinas/intansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan 22 UPZ pada sekolah umum. Menurut pengakuan Ketua dan Sekretaris BAZDA Kota Palangka Raya, belum semua UPZ dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal. Untuk itu, Walikota Palangka Raya selaku pemerintah dan Ketua Badan Pertimbangan BAZDA Kota Palangka Raya mengeluarkan Keputusan Nomor 180/61/Huk/2013 tentang Pembentukan/Aktivasi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada Dinas/Badan/Kantor dan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

c. Teknik Pengumpulan

Upaya yang dilakukan dalam pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah dilakukan dalam beberapa cara, diantaranya: membuat kupon infak dan sedekah yang disebar di seluruh Madrasah tingkat dasar hingga menengah atas yang berjumlah 65 sekolah dan mulai dikembangkan ke Sekolah Umum yang hingga saat ini jumlahnya mencapai 22 sekolah. Kupon-kupon tersebut nantinya dikelola oleh masing-masing sekolah yang telah tunjuk sebagai UPZ dan dilaporkan kepada BAZDA Kota Palangka Raya setiap bulan. Hal yang sama juga dilakukan oleh UPZ di beberapa Instansi di wilayah Kota Palangka Raya yang jumlahnya 25 UPZ.³⁴

Selain itu, BAZDA Kota Palangka Raya juga membuka layanan jemput zakat melalui nomor telepon (0536) 3385319 dan layanan hitung zakat melalui nomor 081349706872 dan 085251185299 atau para muzakki dapat langsung konsultasi ke sekretariat BAZDA Kota Palangka Raya.

Meskipun beberapa upaya pengumpulan telah dilakukan, perolehan zakat masih sangat sedikit dibandingka infaq dan sadaqah. Menurut Supriyanto kendalanya pada publikasi yang belum gencar dan maksimal, sehingga zakat terutama hanya diperoleh dari para

³⁴ Dokumentasi BAZDA Kota Palangka Raya, Juli 2013

muzakki yang sudah dikenal dan mudah berkomunikasi dengan pengurus setiap tahunnya.³⁵

Aktivitas pengumpulan zakat, infaq dan sadaqah tersebut diakui oleh H. Muhdiannur lebih banyak dilakukan pada bulan Ramadhan hingga hari Raya Udul Fitri karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat muslim dalam rangka mendapat pahala yang berlipat ganda pada bulan tersebut.³⁶

Setelah melakukan pengumpulan, BAZDA Kota Palangka Raya melakukan distribusi zakat, dan pendayagunaan infaq dan sedekah dengan peruntukan dan proporsi yang dibedakan. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah yang telah diperoleh dilakukan dengan cara:

- a. Pengelolaan dana zakat yang disalurkan langsung (harus habis) untuk :
 - 1) Beasiswa fakir miskin
 - 2) Paket dhua'afa
 - 3) Santunan Muallaf
 - 4) Santunan bagi Musaffir
 - 5) Bantuan ibadah sosial
 - 6) Santunan bagi orang yang sakit
- b. Pengelolaan dana infak dan sedekah yang diproduktifkan berupa:
simpan pinjam bergulir untuk Usaha Kecil dan Menengah yang hingga

³⁵ Wawancara pada tanggal 4 September 2013

³⁶ Wawancara pada tanggal 30 Juni 2013

tahun 2013 berjumlah 70 UKM dan masing-masing diberi pinjaman sebesar antara Rp. 1, 5 juta hingga Rp. 2 juta.

- c. Pengembangan dan Pembinaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di beberapa SKPD di lingkungan Kota Palangka Raya. Untuk ini, BAZDA Kota Palangka Raya bekerjasama dengan Kemenag Kota Palangka Raya yang memiliki dana untuk program yang sama.
- d. Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat lainnya seperti amil-amil mesjid dan sekolah-sekolah.

Dana Zakat langsung disalurkan kepada para mustahiq (beasiswa untuk siswa dan mahasiswa miskin, santunan dan pembinaan muallaf dan bantuan musafir) agar langsung habis (secara konsumtif) berupa uang atau barang sembako tergantung keinginan para muzakki. Penentuan mustahiq zakat ini dilakukan dengan strategi: 1. Para mustahiq dipilih sendiri oleh mustahiq, agar muzakki yakin zakatnya diterima oleh para mustahiq di sekitar tempat tinggalnya, sedangkan BAZDA menyiapkan paket-paket zakatnya 2. Mustahiq ditentukan oleh BAZDA Kota Palangka Raya, apabila muzakki mengamanahkan secara penuh, 3. Mustahiq disiapkan secara bersama-sama oleh muzakki dan BAZDA Kota Palangka Raya.

Adapun dana infaq dan shadaqah yang jumlah masuknya lebih banyak dibanding dana zakat, didistribusikan dan diberdayagunakan kepada mustahiq seperti dana bergulir (secara produktif) untuk pedagang kecil (penjual bakso gerobak, penjual gorengan dll).

3. Fungsi Pengendalian

Fungsi pengendalian bagi BAZDA Kota Palangka Raya yang dilakukan secara internal maupun eksternal selama periode 2011-2013 nampaknya dilaksanakan cukup baik. Secara Internal, Pengendalian dilakukan oleh Badan Pelaksana (yang aktif) yakni antara Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang saling berkomunikasi dalam pelaksanaan program terutama menyangkut pengelolaan dana zakat, infaq maupun sadaqah yang masuk ke BAZDA Kota Palangka Raya. Hal ini nampak dari kesepahaman dan kekompakan mereka dalam memberikan komentar. Sedangkan secara eksternal, pengamatan dan pengawasan serta pembinaan dilakukan oleh Badan Pertimbangan yakni Walikota Palangka Raya dan Kepala Kemenag Kota Palangka Raya.

4. Fungsi Pelaporan

Laporan pelaksanaan program dan keuangan disampaikan secara tertulis setiap triwulan kepada Walikota Palangka Raya, BAZDA Propinsi Kalimantan Tengah, Kemenag Kota Palangka Raya, dan para muzakki. Secara administratif pengurus sangat terbantu dengan adanya tenaga honorer lepas semenjak tahun 2011 yang membuat laporan secara rutin kepada semua pihak yang terkait tersebut. Namun hasil penelusuran yang tersedia hanya laporan tahun 2012 dan 2013 triwulan I dan II. Sementara laporan tahun 2011 menurut Sekretaris dan Bendahara sudah lengkap hanya saja pengarsipan yang kurang rapi disebabkan adanya

perpindahan ruang BAZDA pada awal tahun 2011 sehingga beberapa data dan arsip BAZDA sulit ditemukan.

Adapun data perolehan zakat, infaq, dan sadaqah pada tahun 2012 hingga bulan Juni 2013 dapat dipaparkan berikut:³⁷

NO	Penerimaan	2012	2013 (hingga Bulan Juni)
1	Infak dan Sedekah	Rp. 68.096.300	Rp. 8.949.000
2	Zakat Maal	Rp.119.100.000	Rp. 5.717.200
3	Zakat Profesi	Rp. 1.143.750	Rp. 200.000

C. Penerapan Wewenang BAZNAS Kota Palangka Raya terhadap LAZ

Wewenang secara umum yang diberikan kepada BAZNAS selain melaksanakan 3 (tiga) fungsi tersebut di atas, secara khusus sebagai koordinator atas penyelenggaraan zakat secara nasional. Dalam kapasitasnya sebagai koordinator dan pembina amil-amil di masyarakat, diakui belum mampu ditegakkan secara tegas termasuk dalam hal penertiban izin bagi LAZ-LAZ sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (2) UUPZ dimana BAZDA diberikan wewenang memberikan rekomendasi atas dasar kelayakan bagi LAZ-LAZ tersebut. Hal yang menjadi pertimbangan adalah pola kebiasaan masyarakat yang susah untuk dirubah misalnya memberikan zakat kepada ustadz atau guru setempat, amil-amil mesjid terdekat tanpa memperdulikan legalitasnya. Upaya persuasif pun dilakukan secara perlahan

³⁷ Laporan kegiatan BAZDA Kota Palangka Raya Semester I tahun 2012, Semester II tahun 2012, dan Semester I tahun 2013. Untuk laporan tahun 2011 tidak ditemukan penulis sebab pengarsipan yang masih perlu pembenahan

seiring berjalannya waktu hingga sistem zakat secara nasional telah dirancang dengan baik, jelas dan tegas melalui Peraturan Pelaksana UUPZ nantinya.³⁸

Upaya lain yang dilakukan BAZDA Kota Palangka Raya dalam menjalankan fungsinya sebagai koordinator tersebut adalah:³⁹

1. Pembinaan UPZ dikalangan PNS dari beberapa SKPD di Kota Palangka Raya yang sesungguhnya merupakan program kerja kemenag Kota Palangka Raya
2. UPZ masyarakat hampir tidak ada, kecuali amil-amil di beberapa mesjid dan mushalla dengan mengirim blanko laporan agar diisi dan dilaporkan kepada BAZDA Kota Palangka Raya. Aktifitas amil-amil ini pada umumnya hanya pada Bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri dan zakat yang diperoleh pun didominasi berupa zakat fitrah.

Berdasarkan uraian di atas, segala fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh BAZDA Kota Palangka Raya dalam menjalankan amanat UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat nampaknya secara keseluruhan belum mampu dilaksanakan secara maksimal. Di satu sisi, BAZDA Kota Palangka Raya dalam kapasitasnya sebagai amil, bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat, infak dan sedekah yang sangat membutuhkan manajemen, loyalitas, totalitas dan kreatifitas yang tinggi agar dapat dijalankan secara baik dan memperoleh hasil yang maksimal demi kesejahteraan umat. Sementara hal ini sulit dijangkau disebabkan para pengurus BAZDA Kota

³⁸ Wawancara dengan Ketua dan Sekretaris BAZDA Kota Palangka Raya, *Op.Cit.*

³⁹ *Ibid.*

Palangka Raya juga memiliki jabatan dan tugas urgen pada instansi/lembaganya masing-masing sehingga mempengaruhi konsentrasi dan waktunya untuk mengelola zakat di BAZDA Kota Palangka Raya.

Sisi yang lain dalam kapasitasnya sebagai koordinator, BAZDA Kota Palangka Raya dituntut untuk bekerjasama sekaligus membina dan mengawasi kinerja UPZ –UPZ yang telah dibentuknya berikut LAZ-LAZ yang ada di Kota Palangka Raya hingga pada ranah proses legalitas masing-masing LAZ tersebut. Untuk ini, Ketua dan Sekretaris BAZDA Kota Palangka Raya mengaku belum dapat menerapkan secara masif ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUPZ karena membutuhkan pendekatan persuasif dan sosialisasi yang lebih gencar untuk menyamakan visi dan misi tentang pengelolaan zakat dalam UUPZ. Kendalanya yang paling utama belum tersedianya dana operasional baik dari pemerintah Kota Palangka Raya maupun dari bagian amil di BAZDA Kota Palangka Raya yang nominal perolehan dana zakatnya sangat minim tersebut, disamping pula kesibukan semua pengurus pada instansi/lembaganya masing-masing.

Menanggapi besarnya beban fungsi dan wewenang tersebut, Ketua BAZDA Kota Palangka Raya menginginkan bahwa sebaiknya BAZNAS hanya diposisikan sebagai koordinator dan regulator saja, sedangkan pengelolaan zakat difokuskan pada LAZ dan UPZ di lingkungannya masing-masing secara mandiri. Hal ini bertujuan agar BAZNAS dapat secara totalitas dan fokus mengatur, membina, mengawasi, dan mengendalikan keseluruhan pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan LAZ dan UPZ tersebut.

Terlebih apabila bertolak dari sejarah ketidakberhasilan membangun sistem perzakatan nasional pada masa berlakunya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dimana menurut pendapat Asep Saepudin Jahar⁴⁰, lembaga-lembaga zakat berdiri cenderung independen dan mencanangkan program masing-masing yang lemah membangun koordinasi dan sinergi antar satu lembaga dengan lembaga lainnya. Lembaga zakat terkesan bersaing satu sama lain, bahkan hampir tiap lembaga yang berafiliasi pada yayasan pendidikan, masjid, lembaga pelatihan, mendirikan unit pengumpulan zakat yang umumnya terpisah dari lembaga-lembaga yang ada. Karena itu dana zakat yang beredar di masyarakat sulit untuk dipantau sehingga estimasi zakat yang dibuat oleh CSRC sebesar 19 trilyun pertahun, sulit untuk diukur, selain hasil rata-rata pengalihan dengan jumlah penduduk Muslim di Indonesia. Fenomena gerakan filantropi Islam yang bersifat independen ,tanpa kontrol akan menghambat tujuan utamanya, yaitu mengentaskan kemiskinan (mustahik menjadi muzakki).⁴¹

Untuk itulah dibutuhkan wewenang BAZNAS yang secara kelembagaan sangat strategis mengingat kedudukannya sebagai lembaga negara yang bersifat independen guna mendukung usaha pemerintah sebagai “jalur ketiga”⁴² (selain dari program pemerintah yaitu pembangunan ekonomi dan program bantuan pro

⁴⁰ Asep Saepudin Jahar, *Masa Depan Filantropi Islam Indonesia Kajian Lembaga-lembaga Zakat dan Wakaf*, Makalah disampaikan dalam acara Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke 10 di Banjarmasin, 1 – 4 November 2010, Kalimantan Selatan, hal. 685.

⁴¹ *Ibid.* hal. 686

⁴² Presiden Susilo Bambang Yudoyono, *Presiden: Zakat Jalur Ketiga Kurangi Kemiskinan* dalam <http://www.republika.co.id>. (18 Maret 2011) diakses pada tanggal 28 Maret 2012

rakyat) dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun untuk menghindari disfungsi ataupun *conflic of interest* antara LAZ dan BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (termasuk infak dan sedekah) maka akan lebih bijak dan efektif apabila BAZNAS dikonsentrasikan pada fungsi *regulating*, *controlling*, dan *evaluating* sebagaimana halnya wewenang yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia saat ini.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. BAZNAS memiliki kedudukan yang sangat signifikan dalam pengelolaan zakat nasional (Pasal 6 UUPZ) yakni sebagai lembaga negara/pemerintah pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan zakat. Adanya legitimasi keterlibatan negara dalam persoalan pengelolaan zakat ini merujuk kepada Konstitusi Negara Indonesia khususnya Pasal 29 dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. BAZNAS bertanggung jawab menjalankan fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan (Pasal 6 dan Pasal 7 UUPZ).
2. Penempatan BAZNAS sebagai pemegang wewenang tidak terlepas dari:
 - a. Pengalaman historis, dimana terjadi *lost* koordinasi dan pengawasan karena BAZ dan LAZ sejajar sebagai pengelola zakat (UU Nomor 38 Tahun 1999) dan b. Secara filosofis, pengelolaan zakat membutuhkan tanggung jawab yang besar bagi pengelolanya dalam rangka amanah vertikal (Allah SWT) dan amanah horizontal (masyarakat muzakki dan mustahiq) sehingga dibutuhkan adanya kekuatan eksekutif (pemerintah)

untuk menjalankan UUPZ. BAZNAS diberikan wewenang untuk memberi pertimbangan/rekomendasi atas legalisasi lembaga-lembaga zakat yang ada di seluruh Indonesia (Pasal 18 ayat (2) huruf c UUPZ), karena posisi LAZ dibawah koordinasi dan pengawasan BAZNAS dan berfungsi sebagai penyokong BAZNAS dalam menjalankan fungsinya secara nasional (Pasal 17 UUPZ).

3. BAZDA Kota Palangka Raya secara kelembagaan, kepengurusan, dan pelaksanaan program kerja belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, mengingat belum adanya Peraturan Pelaksana UUPZ tersebut. Fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan pengelolaan zakat, maupun wewenang terhadap LAZ di lingkungan BAZDA Kota Palangka Raya masih belum optimal dilaksanakan karena beberapa faktor: pengurus memiliki kesibukan dan memiliki jabatan penting, tidak adanya dana operasional dari pemerintah sehingga publikasi sulit dilakukan dan berakibat pada minimnya perolehan jumlah zakat, infak, dan sedekah.

B. Saran

1. Perlu dilakukan pembatasan dan penegasan tugas dan wewenang BAZNAS dalam Peraturan Pelaksana UUPZ dengan memposisikan BAZNAS sebagai koordinator dan regulator agar dapat maksimal mengawasi dan mengarahkan roda pengelolaan zakat, dan fungsi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dibebankan kepada UPZ dan LAZ agar tepat sasaran.

2. Pengurus BAZDA Kota Palangka Raya ke depan agar segera menyesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2011 dalam struktur dan komposisi kepengurusannya, dengan memilih pengurus yang memenuhi syarat dan memiliki waktu penuh dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2006. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media.
- Ahmad Warson Munawwir, 1997. *Al Munawwar, Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif
- Al Qurthubi, 1413H/1993 M., *Al Jami' Li Ahkami al Qur'an*, Beirut Lebanon: Daar el Kutub 'ilmiyyah.
- Bahtiar Effendy, 1998. *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hal.9
- Depag RI, 2002. *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV.Indah Press.
- , 2008. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat Depag RI
- , 2009. *Panduan Pengembangan Usaha bagi Mustahiq*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, hal. 11-12.
- Didin Hafidhuddin, 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.
- Hilman Latief, 2008. *Filantropi Islam, Agenda Organisasi Sektor Ketiga, dan Masyarakat Sipil Di Indonesia. Zakat dan Empowering. Jurnal Pemikiran dan Gagasan*,. Vol. 1, No. 4, tanggal 9 Agustus 2008, hal. 81.
- Jimly Asshiddiqie, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press.
- Kamaruzzaman, 2001. *Relasi Islam dan Negara, Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Magelang: IndonesiaTera.
- Kemenag RI, 2012. *Profil LPZ*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam
- , 2012. *Petunjuk Teknis Evaluasi dan Pelaporan LPZ*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI

- M. Ali Hasan, 2000. *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- M. Ali Hasan, 2006. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- M. Quraish Sihab, 2002. *Tafsir al Misbah, Volume 5*, Jakarta: Lentera Hati.
- Muhammad Ridwan, 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwi (BMT)*, cet 2. Yogyakarta : UI Press.
- Sulaiman Rasjid, 1992. *Fiqh Islam*, Bandung: CV. Sinar Baru.
- Trie Anis Rosyidah dan Asfi Manzilati, tt., *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Beberapa Laz Di Kota Malang)*, Tesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Wahbah al Zuhayly, 2005. *Zakat, Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Yusuf al Qaradhwai, 1991. *Fiqh Zakat, Juz II*, Beirut: Muassasah Risalah
- , 2007. *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddi, dan Hasanuddin, Bogor: Pustaka Lintera AntarNusa.
- , 2005. *Spektrum Zakat*, Diterjemahkan oleh Sari Narulita, Jakarta: Zikrul Hakim.
- , 2007. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Diterjemahkan oleh Salman Harun dkk., Bogor: Pustaka Litera AntarNusa

B. Artikel Internet

<http://imamuna.wordpress.com/2011/07/25/fiqih-zakat/>, online 21 April 2013.

<http://www.dompethuafa.org/2011/04/26/peran-negara-dalam-pengelolaan-zakat-di-indonesia-ii/> online tanggal 21 April 2013

Amelia Fauzi, *Sejarah Pengelolaan Zakat*. Lihat <http://www.dsniamanah.or.id/index.php>, online 20 April 2013.

Nuridafatihah.bolgsport.com/2012/06/Pengertian-Lembaga-Dan-Organisasi/
online 21 April 2013

[http://digilib.uin-suka.ac.id/7754/2/BAB%20I%2C%20VI%2C%20DAFTAR
%20PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/7754/2/BAB%20I%2C%20VI%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf). diakses tanggal 1 Juni 2013

<http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/188> diakses pada tanggal
23 April 2013

[http://abumujahidah.blogspot.com/2012/11/zakat-dan-relevansi-
pengelolaannya-oleh.html](http://abumujahidah.blogspot.com/2012/11/zakat-dan-relevansi-pengelolaannya-oleh.html) diakses tanggal 23 Juli 2013

[http://www.uinjkt.ac.id/index.php/section-blog/28-artikel/1410-negara-dan-
pengelolaan-zakat.html](http://www.uinjkt.ac.id/index.php/section-blog/28-artikel/1410-negara-dan-pengelolaan-zakat.html) diakses pada tanggal 23 Juli 2013.

[http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-
no-23-tahun-2011](http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011)

[http://harian-pelita.pelitaonline.com/cetak/2013/09/19/megefektifkan -fungsi-
koordinasi-baznas#.Um3QmX37NoN](http://harian-pelita.pelitaonline.com/cetak/2013/09/19/megefektifkan-fungsi-koordinasi-baznas#.Um3QmX37NoN) diakses tanggal 28 Oktober
2013

<http://www.republika.co.id>. (18 Maret 2011), *Presiden: Zakat Jalur Ketiga
Kurangi Kemiskinan*, diakses pada tanggal 28 Maret 2012

C. Dokumen

Laporan Sekilas tentang BAZ Kota Palangka Raya: 2007, tt

Pengurus BAZ Kota Palangka Raya, 2007. *Laporan Kegiatan BAZ Kota
Palangka Raya*, t.p., t.h.

Laporan kegiatan BAZDA Kota Palangka Raya tahun 2012

Laporan kegiatan BAZDA Kota Palangka Raya Semester I tahun 2013.

D. Perundang-Undangan

UUD 1945

UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara RI
Tahun 1999 Nomor 164 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
3885)

UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5255)

Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat

Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 178 Tahun 2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Palangka Raya Masa Bhakti 2011-2014

BAHAN WAWANCARA

**PENELITIAN DOSEN STAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2013
TENTANG
“FUNGSI DAN WEWENANG BAZ DALAM UU NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(STUDI PADA BAZNAS KOTA PALANGKA RAYA)**

SDM BAZNAS KOTA PALANGKA RAYA	
1	Apakah komposisi dan personalia kepengurusan BAZNAS Kota Palangka Raya? Jawaban:
2	Apakah ada job description dalam kepengurusan BAZNAS Kota Palangka Raya? Jawaban:
3	Apakah semua pengurus bisa aktif dalam melaksanakan tugasnya dalam kepengurusan? Jika tidak, siapa saja yang bisa aktif? Jawaban:
4	Apakah pengurus yang aktif tersebut mempunyai pekerjaan atau tugas lainnya selain sebagai Pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya? Sebutkan Jawaban:
5	Apakah tugas lain tersebut menyita waktu anda dalam menjalankan tugas sebagai pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya? Jelaskan Jawaban:

6	<p>Adakah staf pengelola yang membantu pengelolaan zakat selain pengurus? Jika ada, mengapa dan apa saja tugasnya?</p> <p>Jawaban:</p>
---	--

FUNGSI BAZNAS KOTA PALANGKA RAYA

7	<p>Apakah BAZNAS Kota Palangka Raya memiliki program dan target kegiatan?</p> <p>Jawaban:</p>
8	<p>Apabila ada, kapan membuat program tersebut dan dicantumkan dalam bentuk apa? (Papan Info/Stiker/Brosur/lainnya)</p> <p>Jawaban:</p>
9	<p>Apakah program dan target kegiatan BAZNAS Kota Palangka Raya telah diselaraskan dengan amanat UUPZ Nomor 23 Tahun 2011?</p> <p>Jawaban:</p>
10	<p>Apa saja program yang direncanakan di BAZNAS Kota Palangka Raya semasa periode kepengurusan anda terkait dengan amanat UUPZ tentang fungsi BAZNAS?</p> <p>Jawaban:</p>

11	<p>Apa saja program yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Palangka Raya terkait dengan amanat UUPZ tentang fungsi BAZNAS?</p> <p>Jawaban:</p>
12	<p>Apakah ada program yang tidak dapat dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Palangka Raya semasa periode kepengurusan anda?</p> <p>Jawaban:</p>
13	<p>Apabila ada, apa kendala-kendalanya?</p> <p>Jawaban:</p>
14	<p>Bagaimana cara pengumpulan dan penyaluran zakat kepada para mustahiq?</p> <p>Jawaban:</p>
15	<p>Apakah ada pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Palangka Raya?</p> <p>Jelaskan</p> <p>Jawaban:</p>

16	Apakah target yang perolehan zakat yang ingin dicapai setiap tahunnya? Berapa? Jawaban:
17	Berapa kalkulasi perolehan zakat yang dikelola BAZNAS Kota Palangka Raya khususnya selama anda menjadi pengurus? Jawaban:
18	Bagaimana sistem pembuatan dan penyampaian laporan kinerja kegiatan BAZNAS Kota Palangka Raya? Jawaban:
WEWENANG BAZNAS TERHADAP LAZ	
19	Ada berapa jumlah LAZ yang beroperasi di Kota Palangka Raya? Jawaban:
20	Apakah pernah dilakukan sosialisasi dan pembinaan terkait Pasal 6, Pasal 18, dan Pasal 19 UUPZ terhadap LAZ-LAZ tersebut? Jawaban:
21	Bagaimana bentuk koordinasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat oleh LAZ-LAZ kepada BAZNAS Kota Palangka Raya? Jawaban:

22	<p>Ada berapa LAZ yang telah memenuhi syarat Pasal 18 UUPZ?</p> <p>Jawaban:</p>
23	<p>Apa tindakan BAZNAS Kota Palangka Raya terhadap LAZ maupun individu yang belum dan tidak memenuhi syarat namun masih melakukan pengelolaan zakat?</p> <p>Jawaban:</p>
24	<p>Ada beberapa pendapat bahwa BAZNAS disarankan hanya sebagai koordinator, pengawas dan regulator saja, sementara aktifitas pengumpulan dan distribusi zakat dilakukan oleh LAZ-LAZ swasta. Bagaimana pendapat anda?</p> <p>Jawaban:</p>

Sekian, terima kasih banyak atas waktu dan kerjasamanya.

